

STUDI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

Skripsi

Jurusan/Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian



Oleh :

DYAH PUSPITA RIYANINGTYAS

H 0405003

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan pertanian mengalami keterpurukan setelah pengelolaan penyuluh dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pola pengawasan dan pembinaan penyuluh terabaikan yang menyebabkan kinerja penyuluh menurun tajam. Pada tanggal 11 Juni 2005 Presiden RI mencanangkan Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) di Jatiluhur, Provinsi Jawa Barat, sebagai *Triple Track Strategi* Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2007).

Perubahan sistem pemerintahan seiring dengan bergulirnya otonomi daerah juga telah berdampak pada desentralisasi penyuluhan pertanian yang telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian ini sangat penting untuk menggantikan sistem penyuluhan yang bersifat regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan yang partisipatif (Mardikanto, 2009). Penyuluhan partisipatif telah membuka peluang besar bagi petani dan pelaku usaha lainnya untuk menyalurkan aspirasinya, harapan, kebutuhan, potensi serta peran aktif mereka dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Berawal dari hal tersebut, maka muncullah penyuluh-penyuluh swadaya yang mendukung peran penyuluh pertanian lapangan dan diakui keberadaannya oleh Undang Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Mardikanto (1994) mengungkapkan bahwa pengalaman dari pembangunan pertanian yang diselenggarakan di Indonesia memberikan pelajaran berharga bahwa kegiatan penyuluhan pertanian bukanlah sekedar faktor pelancar tetapi terbukti sebagai pemegang kunci keberhasilan. Pelaksana utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil yang mayoritas hanya memiliki modal berupa lahan dan aset lainnya yang sangat terbatas. Petani-petani kecil tersebut umumnya juga lemah dalam

hal pengetahuan, keterampilan, dan seringkali juga lemah semangatnya untuk memperbaiki mutu hidupnya. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian bertindak sebagai upaya pendidikan untuk mengubah perilaku yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani kecil untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan pembangunan mereka. Melalui penyuluhan pertanian, teknologi baru yang berkaitan dengan perbaikan usahatani dapat diadopsi oleh petani-petani kecil pelaksana pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian juga dijadikan ujung tombak dari upaya penanggulangan masalah-masalah kritis baik upaya preventif maupun represif terkait dengan kegiatan usahatani.

Mengingat peranannya sebagai pemegang kunci keberhasilan, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian terutama di daerah-daerah yang berpotensi sebagai penghasil tanaman pangan sangat perlu dilakukan dan harus mendapatkan perhatian, khususnya pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu perubahan tingkah laku petani menuju ke arah perbaikan usahatani yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga petani. Apabila keadaan demikian berjalan dengan baik, maka potensi yang terkandung di daerah tersebut dapat diwujudkan sebagai suatu realitas yang terus bertahan sebagai benteng ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang berperan sebagai penyangga utama Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Jawa Tengah. Kecamatan yang produktivitas padinya terbesar di Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Ngombol. Selain itu, kecamatan ini ternyata juga merupakan kecamatan yang paling berpotensi untuk produksi tanaman padi karena memiliki lahan sawah yang paling luas di antara kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif sehingga realitas yang telah dicapai tersebut dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan. Selain itu potensi yang ada juga dapat terus digali untuk mendapatkan realitas yang lebih baik lagi. Untuk itu, diperlukan suatu studi tentang penyelenggaraan

penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sebagai upaya untuk menciptakan perubahan perilaku petani menuju ke arah pencapaian usahatani yang lebih efisien dan produktif.

B. Perumusan Masalah

Penyuluhan pertanian telah memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian kaitannya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian, para pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani dapat mengubah perilakunya baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilannya menuju ke arah perbaikan sistem usaha tani yang akan membawa ke arah peningkatan produktivitas, pendapatan dan selanjutnya akan mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga petani. Penyuluhan pertanian juga merupakan langkah pemberdayaan petani yang akan mencetak petani-petani yang mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa adanya ketergantungan secara terus-menerus kepada pihak lain.

Walaupun penyuluhan pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ditemukan adanya kendala. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan Ngombol diantaranya terkait dengan pembiayaan penyuluhan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kelembagaan penyuluhan pertanian.

Penyediaan biaya operasional untuk mendukung penyuluhan pertanian yang tidak memadai oleh pemerintah daerah merupakan permasalahan pokok yang menghambat kelancaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol. Biaya untuk mengadakan pertemuan kelompok tani dengan penyuluh pertanian selama ini berasal dari swadaya kelompok tani dengan tingkat antusias yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok tani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. Perhatian pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menyediakan dana masih belum optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol juga masih terbatas. BPK Kecamatan Ngombol belum mempunyai gedung sendiri dan keberadaannya masih menyatu dengan kantor kecamatan. Fasilitas dan perlengkapan kantor untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan masih sangat minim. Selain itu, kendaraan dinas untuk penyuluh pertanian juga masih kurang.

Perubahan kelembagaan penyuluhan juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal tersebut terkait dengan proses adaptasi terhadap tugas dan tanggung jawab penyuluh pertanian dalam kedudukannya dalam kelembagaan penyuluhan yang baru. Selain itu juga terdapat ketidaksinkronan antara Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kehutanan terkait dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di kelembagaan penyuluhan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sajakah komponen sistem penyuluhan pertanian yang berpengaruh dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimanakah peran komponen sistem penyuluhan pertanian terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimanakah proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?
4. Permasalahan apa saja yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan bagaimanakah cara mengatasinya?
5. Bagaimanakah dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui komponen sistem penyuluhan pertanian yang berpengaruh dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengkaji peran komponen sistem penyuluhan pertanian terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengkaji proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
4. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan cara mengatasinya.
5. Untuk mengkaji dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian langsung dari lapangan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dalam melakukan penelitian sejenis.
3. Bagi petani, sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyuluhan pertanian sebagai upaya pemberdayaan petani untuk dapat meningkatkan produktivitas usahatani, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya.
4. Bagi pengambil kebijakan yaitu Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya.

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan *skill* untuk memperbesar turut campur-tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuhan dan hewan (Hadisapoetro, 1973).

Arifin (2008) mengungkapkan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kontribusi yang sukar terbantahkan, bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas unggul, lonjakan produksi peternakan dan perikanan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam empat dasawarsa terakhir. Pembangunan perkebunan dan agroindustri juga telah mampu mengantarkan pada kemajuan ekonomi bangsa, perbaikan kinerja ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Program utama pembangunan pertanian yaitu : peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Kedua program tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan menuju ketahanan pangan nasional maupun daerah, melalui tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu serta merata dengan harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2007).

Salah satu pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

tersebut diupayakan melalui penyuluhan pertanian (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2007).

2. Penyuluhan Pertanian

Penyebaran informasi tentang teknologi baru merupakan hal yang penting sehingga petani dapat menggunakan perkembangan pertanian yang terkini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat jurang pemisah antara temuan penelitian dan kebutuhan petani. Agar teknologi tersebut dapat sukses menyebar di kalangan para petani maka sebaiknya teknologi tersebut memberikan tujuan yang berguna bagi pengguna akhirnya. Institusi yang menjembatani jurang pemisah antara petani dan para peneliti dalam bidang pertanian adalah layanan penyuluhan pertanian (National Portal Content Management Team, 2008).

“It is important to disseminate information about new technologies so that the farmer is able to make use of the latest agricultural developments. There also exists a gap between research findings and the needs of farmers. For technology to be successful, it is important that it should serve a useful purpose to the end user. The institution that bridges the gap between farmers and agricultural research scientists is the Agricultural Extension Service” (National Portal Content Management Team, 2008).

Penyuluhan adalah sistem pendidikan luar sekolah di mana orang dewasa dan pemuda belajar dengan mengerjakan. Penyuluhan adalah hubungan kemitraan antara pemerintah, tuan tanah, dan masyarakat, yang menyediakan pelayanan dan pendidikan terencana untuk menemukan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah kemajuan masyarakat (Kelsey and Cannon, 1955).

“Extension work is an out-school system of education in which adults and young people learn by doing. It is a partnership between the goverment, the land-grant colleges, and the people, which provides service and education designed to meet the needs of the people. Its fundamental objective is the development of the people” (Kelsey and Cannon, 1955).

Sedangkan menurut Setiana (2005) penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk anggota masyarakat, terutama yang berada di pedesaan agar meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikap mentalnya menjadi lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarganya, dan pada gilirannya akan meningkat pula kesejahteraan hidupnya. Sejalan dengan Setiana, Tjondronegoro *dalam* Sastraatmadja (1993) mendefinisikan penyuluhan sebagai usaha pendidikan nonforal yang merupakan perpaduan dari kegiatan menggugah minat/keinginan, menumbuhkan swadaya masyarakat, menyebarkan pengetahuan/keterampilan dan kecakapan sehingga diharapkan terjadinya perubahan perilaku (sikap, tindakan dan pengetahuan).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan pertanian yaitu berupa perubahan perilaku penerima manfaat, sedangkan dampak dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan pertanian yaitu berupa perubahan ekonomi, sosial politik maupun lingkungan fisik penerima manfaat seperti kenaikan produksi dan pendapatan, perbaikan dan efektivitas kelembagaan, perbaikan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kepastian hukum, perbaikan indeks mutu hidup, meningkatnya kemandirian, dan lain-lain.

Mosher *dalam* Mardikanto (1994) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian merupakan salah satu faktor pelancar (*accelerator*) sedang

teknologi yang senantiasa berubah merupakan salah satu syarat mutlak (*essential*) pembangunan pertanian. Menanggapi hal tersebut, Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa berbeda dengan “dalil” yang diberikan Mosher tersebut, pengalaman dan pembangunan pertanian yang diselenggarakan di Indonesia memberikan pelajaran berharga berupa kenyataan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian (terutama sejak pelaksanaan Repelita III) bukanlah sekedar “faktor pelancar” tetapi terbukti merupakan pemegang “kunci keberhasilan”. Di sini terlihat bahwa adanya teknologi yang senantiasa berubah hanyalah merupakan “syarat perlu” dan belum memiliki nilai “syarat cukup”.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menekankan bahwa dalam kemajuan pertanian, penyuluhan pedesaan berperan dalam memberikan petunjuk melalui hasil konferensinya di seluruh dunia, pertukaran informasi, program dan proyek di lapangan. Bagaimanapun, terdapat perkembangan dunia yang menuntut sebuah pandangan segar jika pertanian dan penyuluhan pedesaan di negara berkembang direvitalisasi dan menjadikannya menjadi lebih efektif dan efisien. Pandangan ini meliputi perbaikan kelembagaan ke arah privatisasi inovasi orientasi pasar dan desentralisasi perbaikan nonpasar, serta mengangkat latar belakang yang berlawanan di mana sebuah pandangan baru dapat diterapkan (Rivera, 2001).

“The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) contributes considerably to the advancement of agricultural and rural extension as evidenced by its worldwide conferences, information exchanges, field programmes and projects. There are, however, certain global developments that demand a fresh vision if the agricultural and rural extension institutions in the developing countries are to be revitalized and made more effective and efficient. This vision encompasses institutional reforms towards both market-oriented privatizing innovations and non-market decentralizing reforms, and constitutes the backdrop against which a new vision can be applied” (Rivera, 2001).

Sebagaimana termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 bahwa komponen-komponen yang merupakan bagian dari sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yaitu meliputi sasaran penyuluhan, kebijakan dan strategi, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan.

a. Sasaran Penyuluhan Pertanian

Sasaran penyuluhan pertanian yaitu siapa yang sebenarnya disuluh atau ditunjukan kepada siapa penyuluhan pertanian tersebut. Maka dengan tegas kita dapat menyatakan bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah para petani beserta keluarganya (Kartasapoetra, 1991).

Soejitno *dalam* Mardikanto dan Arip (2005) mengemukakan bahwa selaras dengan pengertiannya, yang menjadi sasaran penyuluhan pertanian terutama adalah petani pengelola usahatani dan keluarganya yaitu bapak tani, ibu tani dan pemuda/pemudi atau anak-anak petani. Pernyataan seperti ini tidak dapat disangkal, sebab pelaksana utama budidaya usahatani agar memberikan produktivitas dan atau pendapatan/keuntungan adalah para petani dan keluarganya. Jadi yang harus diubah perilakunya dalam praktek-praktek usahatani guna meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat terutama adalah petani dan keluarganya.

Mardikanto dan Arip (2005) menyatakan bahwa sasaran penyuluhan pertanian pada dasarnya adalah penerima manfaat atau *benefeciaries* pembangunan pertanian, yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan pertanian.

Ballantyne *dalam* Hawkins dkk (1982) mengemukakan bahwa komunitas pertanian merupakan grup klien atau pendengar yang terpenting dalam penyuluhan pertanian. Bagaimanapun, ada pihak lain yang walaupun tidak memiliki dan bekerja di lahan pertanian,

mempunyai ketertarikan yang besar dalam peningkatan produksi pertanian. Organisasi komersial pengolahan barang atau penjual jasa kepada para petani tergantung pada keberuntungan dalam industri lokal pada mata pencaharian mereka. Lagipula, staf mereka sering dimintai pertimbangan oleh petani tentang penggunaan pestisida, pupuk, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya. Studi telah menunjukkan bahwa staf perusahaan tersebut, walaupun semata-mata hanya memperhatikan penjualan produk barang dan jasa mereka, tetapi mereka sering memberikan saran teknis, dan terkadang memberikannya dalam bentuk pelatihan nonformal.

“Ballantyne in Hawkins et all (1982) said that the farm community obviously represents the most important client group or audience for agricultural extension. However, there are other people who, while not owning on working on farms, have a direct interest in the improvement of agricultural productivity. Commercial organization manufacturing goods for or selling services to farmers depend on the fortunes of the rural industries for their own livelihood. Furthermore, their staff often are asked for advice by farmers about use of sprays, fertilizers, equipment, etc. Studies have shown that staff of these firms, although primarily concerned with selling goods and services, often give technical advice, and sometimes give it with the benefit of little or no formal training”.

Undang Undang No.16 Tahun 2006 dalam pasal 5 menyebutkan bahwa pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama terdiri pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun yang dimaksud dengan pelaku utama adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya sedangkan pelaku usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Sasaran antara yaitu pemangku kepentingan

lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

b. Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Jika kebijakan diartikan sebagai pilihan terbaik yang perlu dilakukan oleh setiap manajemen untuk mengelola sumberdaya demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka pemerintah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penyuluhan pertanian yang secara empiris memiliki peran strategis sebagai pemicu maupun pemacu/pelancar pembangunan pertanian (Mardikanto, 2009).

Pertanian mengacu pada produksi dan konsumsi komoditas yang diproduksi dengan menanam tanaman atau mengelola peternakan. Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mengubah perilaku produsen dan konsumen. Analisis terdiri dari evaluasi keputusan pemerintah untuk mengubah perilaku ekonomi. Kerangka pikir untuk analisis kebijakan pertanian, oleh karena itu, adalah sebuah sistem logis untuk menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi produsen, pemasar, dan konsumen hasil panen dan produk pertanian (Pearson dkk, 2004).

“Agriculture refers to the production and consumption of commodities that are produced by cultivating crops or raising livestock. Policies are government action intended to change behaviour of producers and consumers. Analysis consist of the evaluation of government decisions to change economic behaviour. A framework for agriculture policy analysis, therefore, is a logical system for analyzing public policies affecting producers, marketers, and consumers of crops and livestock products” (Pearson et all, 2004).

Mardikanto (2009) juga mengemukakan bahwa salah satu syarat dan faktor pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kebijakan pemerintah untuk pembangunan pertanian dan penjabarannya oleh aparat pemerintah di tingkat regional dan lokal, serta langkah-langkah pelaksanaan yang telah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat

setempat. Tentang hal ini, harus diingat bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan harus mengacu dan merupakan bagian integral yang tidak boleh terlepas bahkan harus memperlancar pelaksanaan serta tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Karena itu, setiap penyuluh harus benar-benar memahami semua kebijakan dan hasil-hasil musyawarah masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan pertanian. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah disepakati, penyuluh yang bersangkutan akan kesulitan dalam merumuskan program penyuluhannya. Di lain pihak, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijaksanaan dan kesepakatan yang telah ditetapkan, dikhawatirkan program penyuluhan yang dirumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda, atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada.

c. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Dalam pengertian sehari-hari, kelembagaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kelembagaan sering diartikan sebatas entitas (kelompok, organisasi) yaitu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Tetapi dalam arti luas, kelembagaan mencakup nilai-nilai, aturan, budaya, dan lain-lain (Mardikanto, 2009).

Undang Undang No.16 Tahun 2006 menetapkan bahwa Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Kelembagaan dalam penyuluhan pertanian terdiri atas dua macam kelembagaan yaitu kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, sedangkan kelembagaan pelaku utama yaitu kelembagaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas

kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Untuk kelembagaan penyuluhan pemerintah, bentuk-bentuknya meliputi : pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan, dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, dan kehutanan setempat. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Terkait dengan kelembagaan pelaku utama, Undang Undang No.16 Tahun 2006 menetapkan bahwa kelembagaan pelaku utama dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi. Kelembagaan tersebut berfungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan pelaku utama difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

d. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Undang Undang No.16 Tahun 2006 menetapkan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian; Penyuluh Swasta, yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; dan Penyuluh Swadaya, yaitu pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga

masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Suhardiyono (1992) menjelaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki beberapa peran yang dapat diisi secara bertahap, yaitu :

1.) Penyuluh sebagai pembimbing petani

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru petani dalam pendidikan nonformal. Seorang penyuluh harus mengenal sistem usahatani setempat dan mempunyai pengetahuan tentang sistem usahatani, bersimpati terhadap kehidupan petani serta pengambilan keputusan yang diambil oleh petani baik secara teori maupun praktek. Penyuluh harus mampu memberikan praktek demonstrasi tentang suatu cara atau metode budidaya suatu tanaman, membantu petani menggunakan sarana produksi pertanian dan peralatan dengan tepat, memberikan bimbingan kepada petani tentang sumber dana kredit yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahatani mereka dan mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan petani yang berasal dari instansi terkait.

2.) Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator petani

Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian tidak mungkin mampu untuk melakukan kunjungan kepada masing-masing petani, sehingga petani harus diajak untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan mengembangkannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang mempunyai peran dalam mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Dalam pembentukan dan pengembangan kelompok tani ini para penyuluh berperan sebagai organisator dan dinamisator.

3.) Penyuluh sebagai teknisi

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang baik, karena pada suatu saat ia akan diminta oleh petani untuk memberikan saran maupun demonstrasi kegiatan usahatani yang bersifat teknis.

4.) Penyuluh sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani

Penyuluh bertugas untuk menyampaikan temuan lembaga penelitian kepada petani. Sebaliknya, petani berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang ditemukan oleh lembaga tersebut kepada penyuluh yang membina sebagai jembatan penghubung. Selanjutnya penyuluh menyampaikan hasil penerapan teknologi yang disampaikan oleh petani kepada lembaga penelitian yang terkait sebagai bahan referensi lebih lanjut.

Mukherjee (1969) mengemukakan bahwa riset adalah suatu proses yang berkelanjutan yang memerlukan sejumlah kompetensi dan telah teruji dalam pertanian, peternakan, irigasi, pengolahan makanan dan pemeliharaannya. Dengan demikian, sebelum hasil riset ditransmisikan untuk diadopsi oleh para petani, maka sangat penting untuk diadakan suatu pengujian di lapangan oleh staf ilmuwan yang bekerja dari sejumlah percobaan lokal. Mereka tidak harus sangat terlatih seperti di pusat penelitian, tetapi mereka perlu mempunyai suatu dasar pelatihan dan pendidikan pertanian yang harus berkaitan dengan solusi dari permasalahan praktis yang dihadapi petani dan memperkenalkannya melalui petugas penyuluhan. Akhirnya, kader para pekerja yang secara langsung terlibat dalam diseminasi pengetahuan ilmiah kepada para petani perlu mengetahui tentang kebutuhan pengetahuan petani dalam bidang pertanian dan pelatihan tentang praktek yang diperlukan oleh seorang penyuluh pertanian.

“Mukherjee (1969) said that research is a continuous process and requires an adequate number of competent and experienced scientists in agriculture, animal husbandry, irrigation, food processing and preservation, etc. similarly, before the results of fundamental and basic research are transmitted to the farmers for adoption, it is vitally important that these are tested in the field by a staff of applied scientists working from a large number of regional experimental stations. They need not to be as highly trained

as those working in the central research stations, but they should have a basic agricultural education and training and should be concerned with the solution of the more practical problems confronting the farmers and presented to them through the extension agency. Finally, the cadre of workers who are directly involved in the dissemination of scientific knowledge to the farmers should have the requisite knowledge of agriculture and allied fields and the required practical training of a farm extension workers”.

e. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Undang Undang No.16 Tahun 2006 menetapkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Adapun yang disebut dengan prasarana penyuluhan pertanian yaitu fasilitas untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian yang meliputi antara lain bangunan, lahan percontohan; sedangkan sarana penyuluhan pertanian yaitu alat-alat bantu penyuluhan pertanian antara lain transportasi, alat peraga dan alat komunikasi.

Kartasapoetra (1991) mengemukakan bahwa sarana dan fasilitas penyuluhan pertanian yang perlu dimantapkan meliputi bangunan, tanah sawah atau daratan, mobilitas, serta perlengkapan penyuluhan. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyuluhan tentunya diperlukan bangunan yang memadai, baik bagi Balai Teknologi Pertanian (BTP) maupun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dalam artian memadai ini terutama perlengkapannya. Jenis-jenis bangunan yang diutamakan adalah gedung perkantoran, ruangan pertemuan atau ruangan latihan dan kursus serta pergudangan untuk menyimpan alat-alat yang diperlukan.

Tanah persawahan atau daratan yang menunjang praktek-praktek penyuluhan, pengujian, dan percontohan hendaknya diperhatikan pula. Tanah persawahan atau daratan tersebut umumnya menggunakan tanah yang ada yang berasal dari BPMD, PPTK dan sebagainya, sedangkan tanah lainnya yang masih diperlukan dapat diusahakan dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada Pemerintah Daerah setempat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah di daerah, maka keperluan ini tentu akan terpenuhi.

Guna menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan kepada para petani diperlukan pula alat-alat transportasi yang memadai, terutama bagi wilayah-wilayah yang letaknya jauh. Memadai dalam hal ini hendaknya diartikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapang. Dengan tersedianya alat-alat transportasi ini selain datangnya penyuluh ke tempat tujuan tidak terlalu menyita tenaga juga akan menjamin kehadirannya tepat pada waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan penyuluhan kepada para petani di pedesaan memerlukan alat-alat perlengkapan penyuluhan. Alat-alat tersebut meliputi flipchart; bahan-bahan bacaan berupa leaflet, brosur, buku-buku pertanian dan sebagainya; percontohan-percontohan berupa monster, *speciman*, dan sebagainya; radio, *tape recorder*, battery dan sebagainya.

f. Pembiayaan Penyuluhan Pertanian

Unsur pembiayaan, di dalam kegiatan penyuluhan diperlukan untuk :

- 1.) Biaya personil (gaji, upah, tunjangan, intensif, dan lain-lain)
- 2.) Pengadaan perlengkapan (alat bantu dan alat peraga penyuluhan)
- 3.) Biaya operasional (pembuatan/perbanyakan/penyebarluasan materi penyuluhan, biaya perjalanan, dan lain-lain)
- 4.) Biaya manajemen (kantor, perlengkapan, sarana transportasi, pos dan telekomunikasi, alat tukis/kantor, dan lain-lain)

5.) Biaya operasional dan pemeliharaan (kantor, sarana kantor, sarana transportasi, perlengkapan penyuluhan, dan lain-lain)

(Mardikanto, 2009).

Undang Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan oleh APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

g. Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian

Pengawasan merupakan suatu proses yang mana pimpinan organisasi memantau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta membuat penyesuaian-penyesuaian jika dipandang perlu. Pengawasan diartikan sebagai pengamatan dari dekat (secara langsung) dan atau dari jauh (secara tidak langsung) yang dilakukan secara menyeluruh dengan jalan membandingkan antara pekerjaan yang dilakukan dengan yang seharusnya dilakukan. Pada pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dilakukan terhadap penerapan sistem kerja latihan dan kunjungan yang dilaksanakan pada suatu organisasi. Sebagai suatu proses, pengawasan ini mempunyai tiga komponen utama yaitu rencana kerja yang tepat, pengamatan pelaksanaan kegiatan baik dari dekat maupun dari jauh, dan tindakan koreksi.

Pengamatan dari dekat dalam pelaksanaan kegiatan seringkali disebut dengan pemeriksaan, namun jika pemeriksaan disertai dengan pemberian bimbingan dan petunjuk langsung pada saat pelaksanaan pemeriksaan maka disebut sebagai supervisi. Pelaksanaan pengawasan

terhadap unit kegiatan biasanya dilakukan melalui supervisi dengan mendatangi secara langsung dan membandingkan kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Sedangkan pengamatan dari jauh seringkali disebut dengan monitoring. Kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui pelaporan. Untuk memperoleh hasil pelaporan yang baik, artinya tepat waktu dan akurat, perlu ditetapkan terlebih dahulu sistem dan prosedur pelaporan di samping penetapan informasi yang ingin disajikan.

Tindakan koreksi dilakukan dengan maksud untuk mengarahkan kembali semua kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Tindakan koreksi hanya dilakukan jika telah terjadi penyimpangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini dapat diketahui dari laporan yang diterima melalui monitoring maupun dari kegiatan supervisi lapangan (Suhardiyono, 1992).

Undang Undang No.16 tahun 2006 dalam pasal 34 menetapkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta dan swadaya. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

3. Administrasi Penyuluhan Pertanian

a. Definisi Administrasi Penyuluhan Pertanian

Administrasi dalam pengertian sempit adalah kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis. Semua keterangan yang diperlukan itu dalam keseluruhannya dan hubungan satu sama lainnya. Dalam arti sempit ini administrasi tidak lebih dari kegiatan mencatat, mengirim dan menyimpan keterangan yang diperlukan oleh sejumlah personil dalam suatu ruangan dengan tumpukan berkas yang memuat keterangan-keterangan tersebut. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah

serangkaian kegiatan sebagai suatu proses pengendalian usaha kerja sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian administrasi untuk penyuluhan pertanian menggunakan pengertian administrasi dalam arti luas. Dengan demikian pengertian administrasi tidak hanya terbatas pada pengertian ketatausahaan saja, tetapi lebih luas dari itu yaitu mencakup semua aspek yang mendukung tercapainya tujuan penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, administrasi penyuluhan mencakup aspek manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Di samping hal tersebut administrasi juga menyangkut hubungan antar lembaga yang terkait dengannya (Supanggyo, 2007).

b. Fungsi Administrasi Penyuluhan Pertanian

Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan atau “manajer”. Oleh karena itu, setiap pemimpin/manajer sering pula disebut dengan istilah “administrator”. Terkait dengan itu, beberapa fungsi penyuluhan yang perlu diperhatikan adalah :

1.) Administrasi personalia

Personalia dalam penyuluhan terdiri dari administrator, penyuluh spesialis, penyuluh lapangan, staf administrasi, pengawas, kelompok-kelompok penunjang dan kelompok-kelompok sukarela yang dapat membantu tugas-tugas atau kegiatan penyuluhan pertanian.

2.) Kemudahan dan Perlengkapan bagi Penyuluhan Pertanian

Beberapa kemudahan diperlukan dalam penyuluhan pertanian. Perlengkapan yang paling strategis sebenarnya adalah sarana mobilitas atau transportasi bagi penyuluh. Sebab, hanya dengan sarana yang memadai, para penyuluh akan dapat menghubungi

masyarakat sasaran nya lebih efektif. Di samping itu, tidak boleh diabaikan adanya berbagai perlengkapan/kemudahan lain seperti :

- a.) Kantor, agar penyuluh mudah dihubungi oleh masyarakat sasaran nya
- b.) Sumberdaya material, baik yang berupa media informasi (majalah, buku, leaflet) maupun contoh-contoh barang dan peralatan yang dapat digunakan pada saat harus melakukan pelatihan petani, demonstrasi, dan lain sebagainya
- c.) Sarana transportasi
- d.) Perumahan, agar ada jaminan supaya para penyuluh mau bertempat tinggal di wilayah kerjanya

3.) Pengelolaan Keuangan

Termasuk dalam pengelolaan keuangan, baik yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran (jumlah dan sumber nya), penggunaan keuangan, ataupun sistem pengawasan/pemeriksaan keuangannya.

4.) Pelaporan dan Evaluasi

Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam administrasi penyuluhan adalah lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi, baik yang dibuat oleh administrator/staf administrasi, penyuluh lapangan, maupun penyuluh spesialis yang mencakup : kalender kerja/programa penyuluhan, laporan perkembangan kegiatan, dan laporan hasil kegiatan.

5.) Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Lain

Kelemahan umum yang sering dijumpai pada Dinas Penyuluhan adalah kurangnya dijalin komunikasi yang akrab dengan pusat-pusat informasi dan pihak-pihak swasta yang seringkali berperan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan

(Mardikanto, 2009).

4. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Pengkajian dalam konteks input dimulai dengan mempelajari kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, selanjutnya ditelusuri proses penyelenggaraan serta dampak yang terjadi. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Keseluruhan aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian berdampak terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada masyarakat tani (Departemen Pertanian, 2004).

Komponen-komponen yang merupakan bagian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagaimana termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yaitu meliputi program penyuluhan, mekanisme kerja dan metode, materi penyuluhan, peran serta dan kerjasama.

a. Program Penyuluhan Pertanian

Definisi program penyuluhan pertanian menurut Undang Undang No.16 Tahun 2006 adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Inti program adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan petani serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi program ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja penyuluhan pertanian selama satu tahun (Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, 2009).

Program kerja penyuluhan pertanian adalah hasil pemikiran tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan penyuluhan

pertanian di suatu tempat tertentu, sebagai langkah lanjutan untuk kegiatan usahatani atau pengelolaan pertanian yang masa datang di tempat tersebut dengan harapan apa yang dilakukan atau kegiatan penyuluhan yang perlu dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Tujuan yang telah digariskan adalah peningkatan teknologi pengelolaan pertanian agar tercapai peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya (Kartaspoetra, 1991).

Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah baik, maka beberapa acuan tentang pengukurannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.) Analisis fakta dan keadaan

Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap yang menyangkut keadaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, tersedianya sarana/prasarana, dan dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik.

2.) Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan

Perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata yang telah dirasakan masyarakat. Artinya, perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat yang telah dapat dirasakan oleh mereka.

3.) Jelas dan menjamin keluwesan

Perencanaan program harus jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan kesalahpengertian dalam pelaksanaannya. Setiap perencanaan juga harus luwes (memberikan peluang untuk dimodifikasi) sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

4.) Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan

Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat penerima manfaatnya. Jika tidak, program semacam ini tidak mungkin menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya.

5.) Menjaga keseimbangan

Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat dan bukan demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja.

6.) Pekerjaan yang jelas

Perencanaan program, harus merumuskan prosedur dan tujuan sasaran kegiatan yang jelas, yang mencakup : masyarakat penerima manfaatnya; tujuan, waktu, dan tempat; metode yang akan digunakan; tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait; pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel; serta ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya

7.) Proses yang berkelanjutan

Perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tindak lanjut (kegiatan yang harus dilakukan) pada tahapan berikutnya harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan.

8.) Merupakan proses belajar dan mengajar

Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi program perlu mendapat kesempatan “belajar” dan “mengajar”.

9.) Merupakan proses koordinasi

Perumusan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi

untuk menggerakkan semua pihak untuk berpartisipasi didalamnya.

10.) Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

Perencanaan program harus memuat dan memberi kesempatan untuk dapat dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya.

b. Mekanisme Kerja Penyuluhan Pertanian

Mekanisme adalah susunan atau hubungan dari bagian sesuatu yang diadaptasikan untuk menghasilkan sebuah efek (Brainy Media, 2009).

“Mechanism is the arrangement or relation of the parts of anything as adapted to produce an effect” (Brainy Media, 2009).

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan dalam satu kesatuan jalur vertikal dari tingkat pusat sampai kepada kelompok tani dan nelayan beserta keluarganya melalui Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian. Penanggung jawab penyelenggara penyuluhan pertanian dari pusat sampai daerah adalah sebagai berikut :

1.) Di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian

Pelaksanaan sehari-hari, wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan kepada Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian/Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional yang disingkat KPPN.

2.) Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Pelaksanaan sehari-hari selaku penanggung jawab koordinasinya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I (FKPP I).

3.) Di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Pelaksana sehari-hari selaku penanggung jawab koordinasinya dilimpahkan kepada Ketua Pelaksana Harian BIMAS/Ketua Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II (FKPP II).

4.) Di tingkat Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), setelah dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Hubungan kerja antara KPPN – FKPP I – FKPP II – BPP adalah hubungan kerja koordinatif fungsional dalam aspek-aspek penyusunan program, pelaporan, pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hubungan kerja horisontal antara unit-unit kerja penyuluhan pertanian di berbagai tingkat wilayah daerah adalah hubungan kerja fungsional yang dilakukan secara langsung berdasarkan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing tingkat wilayah daerahnya. Hubungan kerja antara Kelompok Tani Nelayan Andalan di berbagai tingkat wilayah daerah dengan BPP/FKPP di wilayah daerah yang bersangkutan adalah hubungan kerja konsultatif. Hubungan kerja BPP dengan unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen dengan BPP diatur oleh Menteri Pertanian dengan konsultasi Menteri Dalam Negeri.

Pada era reformasi, pelaksanaan penyuluhan pertanian menggunakan mekanisme kerja yang didasarkan pada pendekatan partisipatif yang memungkinkan petani ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta menarik manfaat dari kegiatan penyuluhan pertanian (Supanggyo, 2007).

c. Metode Penyuluhan Pertanian

Mardikanto dan Arip (2005) mengemukakan bahwa metode adalah cara penyuluh untuk mendekati dirinya dengan masyarakat sasaran. Kemampuan seseorang untuk mempelajari sesuatu berbeda-beda demikian juga tahap perkembangan mental, keadaan lingkungan dan kesempatannya berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu metode penyuluhan pertanian yang berhasil guna dan berdaya guna. Adapun dasar-dasar dalam pertimbangan pemilihan metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi empat, yaitu :

1.) Sasaran

Yang harus diperhatikan penyuluh dari segisasarannya meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sasaran; sosial budaya; dan banyaknya sasaran yang hendak dicapai.

2.) Sumberdaya penyuluhan

Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan antara lain kemampuan penyuluh, materi penyuluh, serta sarana dan biaya penyuluhan. Kemampuan penyuluh dan pengalaman penyuluh yang meliputi penguasaan ilmu dan keterampilan serta sikap yang dimiliki perlu dipertimbangkan. Materi penyuluhan yang akan disampaikan perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode penyuluhan. Untuk yang bersifat teknis biasanya dipilih metode yang memungkinkan praktek di lapangan dan untuk materi yang bersifat nonteknis, misalnya agar petani mau berkelompok dan mau memasarkan hasil usahanya biasanya diipilih metode diskusi kelompok. Keadaan peralatan, alat-alat bantu, fasilitas dan biaya yang tersedia juga akan menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan.

3.) Keadaan daerah

Pemilihan metode penyuluhan perlu mempertimbangkan kondisi daerah pelaksanaan penyuluh pertanian, antara lain musim, keadaan usahatani, dan keadaan lapangan. Terkait dengan musim, apabila pada suatu keadaan tertentu tidak dapat dilaksanakan suatu proses

produksi maka tentu tidak akan diadakan penyuluhan di tempat usahatani seperti demonstrasi sehingga dalam hal ini akan lebih memungkinkan untuk diadakan pertemuan di rumah petani. Keadaan usahatani turut mempengaruhi pemilihan metode penyuluhan. Misalnya untuk mengintensifkan ternak unggas di suatu daerah maka dipilih metode demonstrasi, sedangkan untuk tujuan introduksi diterapkan metode karya wisata ke tempat lain. Keadaan lapangan seperti topografi, jenis tanah, sistem pengairan, serta sarana juga perlu dipertimbangkan. Misalnya untuk perkampungan yang letaknya terpisah-pisah maka kegiatan penyuluhan akan lebih efektif dilakukan di tempat tinggal petani atau di lahan usahatannya.

4.) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang berasal dari pusat atau daerah terkadang menentukan pemilihan metode penyuluhan. Pendekatan intensifikasi secara massal dan *cash program* memerlukan waktu yang relatif cepat daripada pendekatan perorangan yang pada dasarnya akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Sastraatmadja (1993) mengungkapkan bahwa penggolongan metode penyuluhan pertanian di negara berkembang sekurang-kurangnya ada tiga penggolongan. Pertama adalah berdasarkan jarak jangkauan sasaran. Metode menurut penggolongan seperti ini dapat dibedakan dalam metode langsung (tatap muka) seperti kunjungan rumah, pertemuan, kursus tani, demonstrasi, karyawisata dan metode tidak langsung (memakai media massa) seperti terbitan, siaran radio, siaran TV, sandiwara dan lain sebagainya.

Kedua adalah berdasarkan jumlah sasaran. Menurut penggolongan ini ada tiga pendekatan yang sering dilakukan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan perorangan seperti kunjungan rumah, telepon; pendekatan kelompok seperti pertemuan, demonstrasi, karyawisata, perlombaan, diskusi, kursus tani; dan pendekatan massal

seperti radio, siaran televisi, wayang, brosur, leaflet, folder, poster, spanduk, dan sandiwara.

Ketiga adalah berdasarkan indera penerima yaitu yang dapat dilihat/dibaca seperti terbitan, spanduk, poster, surat, slide, film, pameran; dapat didengar seperti siaran radio, rekaman tape recorder, telepon; dapat dilihat dan didengar seperti film bersuara, siaran TV, wayang, demonstrasi dari lapangan, dan lain sebagainya.

d. Materi Penyuluhan Pertanian

Materi penyuluhan menurut Undang Undang No.16 tahun 2006 adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Vademecum Bimas *dalam* Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa ragam materi yang disiapkan dalam setiap penyuluhan perlu mencakup kebijaksanaan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian seperti pola kebijakan umum pembangunan pertanian, kebijakan harga dasar, penyaluran kredit usahatani, distribusi sarana produksi, pengelolaan air, dan sebagainya; hasil-hasil penelitian/ pengujian dan rekomendasi teknis yang permintaan oleh instansi yang berwenang; pengalaman petani yang telah berhasil; informasi pasar; petunjuk teknis tentang penggunaan alat dan sarana produksi; informasi tentang kelembagaan dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian seperti informasi tentang pusat-pusat informasi penelitian, lembaga keuangan dan perbankan, lembaga pemasaran sarana produksi, perlengkapan pertanian, dan sebagainya; serta dorongan dan rangsangan untuk terciptanya swakarsa, swakarya dan swadaya masyarakat.

Kartasapoetra (1991) mengungkapkan bahwa materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan sasaran dengan demikian maka mereka akan tertarik perhatiannya dan terangsang untuk mempraktekkannya. Materi yang menarik perhatian para petani tentunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha perbaikan produksi, pendapatan dan tingkat hidupnya.

e. Peran Serta dan Kerjasama

Undang Undang No.16 tahun 2006 dalam pasal 29 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan. Sedangkan kaitannya dengan kerjasama, dalam pasal 30 ditetapkan bahwa kerjasama penyuluhan dapat dilakukan antarlembagaan penyuluhan baik secara vertikal, horizontal, maupun lintas sektoral. Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS. Supanggyo (2007) menambahkan kerjasama penyuluhan pertanian dapat dilakukan antara sesama lembaga penyuluh pertanian, maupun antara kelembagaan penyuluhan pertanian dengan lembaga pelayanan lain, petani dan pelaku usaha serta masyarakat lainnya.

Pengajar Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores (Unflor), Reyna Virginia Nona *dalam* Kompas Cybermedia (2007) mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas dan Permasalahan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Ende", permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Ende yaitu meliputi kurangnya perhatian pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menyediakan dana, koordinasi lembaga penyuluh dengan instansi terkait belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang disiapkan untuk operasional penyelenggaraan penyuluhan. Permasalahan lain yang timbul yaitu dana

operasional masih sangat minim, adanya PPL dengan wilayah kerja yang luas tetapi belum mendapatkan kendaraan operasional.

Sebagai tambahan, Mawardi (2004) dalam Subejo (2007) mengidentifikasi beberapa kendala penyuluhan pertanian era otonomi daerah: (1) adanya perbedaan pandangan birokrasi dan DPRD terhadap peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian, (2) kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, (3) ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas, (4) makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh. Penelitian World Bank di beberapa pedesaan Indonesia pada tahun 2000 melaporkan persepsi petani dengan kepemilikan kecil merasa telah ditinggalkan oleh pihak yang berkompeten dalam pertanian. Petani merasa bahwa petugas pertanian tidak lagi membantunya dalam menemukan penyelesaian masalah-masalah yang muncul secara praktis sebagaimana dulu dilakukan ketika revolusi hijau.

5. Balai Penyuluhan

Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyatakan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan. Selanjutnya dalam pasal 15 dijelaskan bahwa balai penyuluhan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
- c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.

- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, dan
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Balai penyuluhan juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.

Kartasapoetra (1991) memaparkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau yang disebut sebagai *Rural Extension Centre* harus berfungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai tempat penyusunan program penyuluhan pertanian
- b. Sebagai tempat penyebarluasan informasi pertanian
- c. Sebagai tempat latihan para PPL yang teratur (secara periodik) sehingga kemampuannya akan selalu meningkat, baik pengetahuan maupun keterampilannya
- d. Sebagai tempat pemberian rekomendasi pertanian yang lebih menguntungkan
- e. Sebagai tempat mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada para petani.

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, maka jelas pula bahwa di BPP tidaklah cukup hanya diselenggarakan kegiatan-kegiatan klasikal saja, melainkan harus terdapat berbagai jenis kegiatan di lapangan yang dalam hal ini di kompleks Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kegiatan lapangan tersebut terutama ditujukan bagi segi-segi pendidikan, baik bagi para PPL maupun bagi para petani. Dengan demikian maka kompleks BPP tidak hanya bermanfaat pelaksanaan rapat, melainkan juga sebagai kegiatan mengajar dan belajar, pelaksanaan diskusi yang menyangkut bidang pertanian, penyampaian informasi secara timbal balik (*two way traffic communication*), menganalisa dan mengevaluasi hal-hal yang berasal dari dan diperuntukkan bagi tingkat lapangan.

6. Urgensi Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah

Sejak bergulirnya reformasi pada awal tahun 1998, yang diikuti dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 (yang telah diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi yang memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Dengan kewenangan yang luas tersebut diharapkan agar daerah dapat mandiri dan mengembangkan kemampuan prakarsanya untuk mengelola sumber daya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, membuka tantangan besar bagi daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam memajukan daerah. Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 2009).

Untuk dapat mewujudkan harapan dan menjawab tantangan tersebut, maka perlu adanya penyuluhan pertanian yang berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan perubahan perilaku ke arah usahatani yang lebih baik guna meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahtraannya; menjembatani gap antara praktek yang harus atau biasa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang; penyampai, pengusaha dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti/dilaksanakan oleh para petani dan menyukseskan partisipasi petani dalam pembangunan nasional; serta memberikan pendidikan dan bimbingan yang kontinyu dalam artian penyuluhan tidak akan berhenti karena dikehandaki adalah keadaan pertanian yang berkembang, lebih baik, dan lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman (Kartasapoetra, 1991).

Subejo (2007) mengungkapkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, otoritas penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, Saragih (2005) dalam Subejo (2007) berpendapat bahwa dengan adanya otonomi daerah, telah diberikan kebebasan kepada *regional agricultural services* untuk mengambil inisiatif dalam mendesain kebijakan spesifik lokal, sementara itu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggungjawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar. Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah lokal memiliki lebih banyak sumber daya serta kebebasan yang lebih besar untuk mengembangkan kebijakan spesifik lokal dan teknologi lokal melalui kajian/penelitian di lembaga penelitian lokalnya. Dengan otonomi daerah ini, tanggung jawab pembangunan pertanian dalam kendali kepala daerah bukan lagi pegawai/dinas pertanian.

Penyuluhan, di era otonomi daerah ini, hampir selalu dipandang sebagai sektor pengeluaran anggaran dan tidak dapat menyumbangkan angka PAD. Namun anggapan itu salah besar jika pihak yang berwenang berkenan memandang penyuluhan sebagai investasi pendidikan non-formal kepada masyarakat pedesaan (dalam hal ini para petani), sebagaimana pernyataan ilmiah para pakar penyuluhan nasional maupun internasional : bahwa penyuluhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, antara lain: (a) melaksanakan pendidikan pertanian di tingkat petani, (b) menyediakan informasi publik untuk menjamin ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, dan (c) secara umum berkontribusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan petani (Tanjung, 2008).

B. Kerangka Berpikir

Pembangunan pertanian telah menunjukkan kontribusi yang sukar terbantahkan dalam pembangunan nasional Indonesia. Salah satu pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

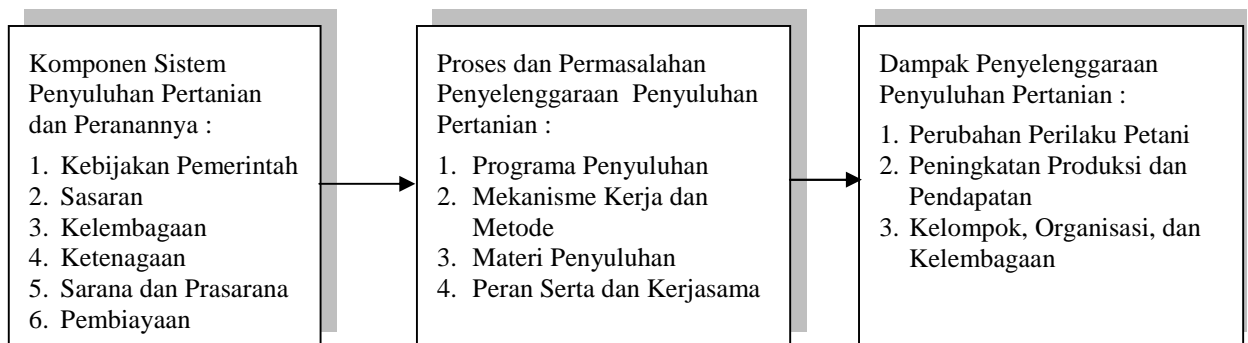
pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan melalui penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pemberdayaan terhadap para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengubah perilaku petani ke arah perbaikan cara berusahatani untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengalaman pada pembangunan pertanian di Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa penyuluhan bukan hanya sekedar faktor pelancar tetapi merupakan pemegang kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Bagian-bagian dari sistem penyuluhan pertanian yaitu meliputi sasaran penyuluhan, kebijakan dan strategi, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Sedangkan komponen-komponen yang merupakan bagian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu meliputi program penyuluhan, mekanisme kerja dan metode, materi penyuluhan, peran serta dan kerjasama.

Bergulirnya otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 telah berdampak pada desentralisasi yang memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah, termasuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dengan kewenangan yang luas tersebut diharapkan agar daerah dapat mandiri dan mengembangkan kemampuan prakarsanya untuk mengelola sumber daya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat dan membuka tantangan besar bagi daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam memajukan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan suatu kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi mengingat pentingnya peranan penyuluhan pertanian sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Pengkajian dalam konteks input dimulai dengan mempelajari kebijakan dan bagian-bagian dari sistem penyuluhan

pertanian, selanjutnya ditelusuri proses penyelenggaraan serta dampak yang terjadi. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir Studi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo

C. Dimensi Penelitian

Adapun dimensi penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
2. Sasaran penyuluhan yaitu penerima manfaat atau *beneficiaries* pembangunan pertanian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yang terdiri atas individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan pembangunan pertanian.
3. Kelembagaan meliputi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan yang terdapat di Kecamatan Ngombol; di mana kelembagaan petani yaitu lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama sedangkan lembaga penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau

masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

4. Ketenagaan atau yang disebut dengan penyuluh yaitu perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo baik itu penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
5. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang tersedia untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol.
6. Pembiayaan penyuluhan pertanian yaitu penyediaan dana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol.
7. Program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
8. Mekanisme kerja yaitu tata cara atau tata urutan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol; sedangkan metode adalah cara penyuluh untuk mendekatkan dirinya dengan masyarakat sasaran.
9. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
10. Peran serta yaitu peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian; sedangkan kerjasama adalah kerjasama yang dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan penyuluhan.
11. Perubahan perilaku yaitu perubahan yang terjadi pada sasaran penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol karena adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

12. Peningkatan produksi dan pendapatan yaitu peningkatan produksi dan pendapatan usahatani sasaran penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol setelah diadakannya penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
13. Kelompok, organisasi, dan kelembagaan yaitu perubahan yang terjadi pada kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang terkait dengan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol setelah diadakannya penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

III. METODE PENELITIAN

A. Strategi dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kirk dan Miller *dalam* Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (Nawawi dan Mimi, 2005).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal yang merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus pada konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar dan terarah pada satu karakteristik (Sutopo, 2005).

Adapun alasan penggunaan studi kasus tunggal adalah karena kasus yang diangkat menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. Teori tersebut telah menspesifikasi serangkaian proposisi yang jelas serta keadaan di mana proposisi-proposisi tersebut diyakini kebenarannya (Yin, 2000).

B. Lokasi Penelitian

Situasi yang didalamnya terdapat persoalan yang substansif, teoritik dan terbuka untuk diteliti layak untuk dipilih menjadi tempat penelitian (Afandi, 1993). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Pengambilan lokasinya yaitu di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan penyangga utama Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di

Jawa Tengah. Sedangkan Kecamatan Ngombol dipilih karena kecamatan ini merupakan kecamatan dengan produktivitas padi terbesar atau disebut sebagai lumbung padi Kabupaten Purworejo. Hal tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Produktivitas Padi Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/Ha)
1.	Grabag	4.495	26.478	58,92
2.	Ngombol	6.634	40.497	61,04
3.	Purwodadi	5.191	29.109	56,07
4.	Bagelen	762	3.661	48,03
5.	Kaligesing	244	1.054	43,24
6.	Purworejo	2.778	16.496	59,37
7.	Banyuurip	5.407	31.469	58,20
8.	Bayan	3.044	18.037	59,25
9.	Kutoarjo	3.477	20.084	57,76
10.	Butuh	5.078	29.121	57,40
11.	Pituruh	4.799	28.193	58,75
12.	Kemiri	2.766	15.680	56,70
13.	Bruno	2.719	9.532	35,06
14.	Gebang	2.738	14.911	54,46
15.	Loano	1.576	8.584	54,46
16.	Bener	1.972	11.020	55,88

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Selain itu, dapat juga dilihat bahwa Kecamatan Ngombol merupakan kecamatan yang sangat potensial untuk produksi padi karena mempunyai lahan sawah yang paling luas daripada kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Luas Sawah di Kabupaten Purworejo Menurut Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)
1.	Grabag	2.651,59
2.	Ngombol	3.419,13
3.	Purwodadi	2.730,90
4.	Bagelen	509,62
5.	Kaligesing	187,43
6.	Purworejo	1.654,14
7.	Banyuurip	2.878,47
8.	Bayan	1.822,83
9.	Kutoarjo	1.977,23
10.	Butuh	2.726,74
11.	Pituruh	2.516,72
12.	Kemiri	1.595,89
13.	Bruno	1.621,32
14.	Gebang	1.667,77
15.	Loano	1.028,95
16.	Bener	1.638,26

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hal di atas, maka perlu adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian guna mempertahankan realitas dan juga dalam mewujudkan potensi yang ada menjadi realitas yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun pemilihan lokasi sampel yaitu di desa-desa yang memiliki potensi-potensi tertentu di Kecamatan Ngombol, ditinjau dari produksi padi, hortikultura, maupun dari segi kelembagaannya.

C. Teknik Cuplikan (*Sampling*)

Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Jumlah sampling tidak ditentukan karena dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak terlalu penting, yang terpenting adalah kelengkapan dan kedalaman informasi yang bisa digali sesuai dengan yang diperlukan untuk pemahaman masalahnya (Sutopo, 2002). Moleong (2001) menambahkan bahwa jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi kuncinya di sini adalah jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel harus dihentikan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 informan yang diambil dari berbagai pihak yang dipercaya untuk dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Data yang Digunakan	Jumlah	Sifat Data				Sumber Data
		Pr	Sk	Kn	Kl	
1. Informan						
a. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)	1	X			X	BPPKP Kabupaten Purworejo
b. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian Wilayah Ngombol	1		X		X	UPT Penyuluhan Pertanian Wilayah Ngombol
c. Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol	1		X		X	BPK Ngombol
d. Penyuluh Kecamatan Ngombol	2		X		X	BPK Kecamatan Ngombol
e. Ketua Kelompok Tani	4		X		X	Kecamatan Ngombol
f. KTNA Kecamatan	1		X		X	Kecamatan Ngombol
g. Petani	3		X		X	Kecamatan Ngombol
h. Pedagang Saprodi	2		X		X	Kecamatan Ngombol
i. Ketua Lumbung Desa	1		X		X	Kecamatan Ngombol
j. Ketua Umum PKK Desa	1		X		X	Kecamatan Ngombol
2. Arsip Atau Dokumen						
a. Data BPK Ngombol	2		X	X	X	Kecamatan Ngombol
b. Data BPPKP Kabupaten Purworejo	3		X		X	BPPKP Kabupaten Purworejo
c. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo	2		X	X		Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo
d. Kecamatan Ngombol Dalam Angka	1		X	X		Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo
e. Kabupaten Purworejo Dalam Angka	1			X		Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Keterangan :

Pr : Primer

Kn : Kuantitatif

Sk : Sekunder

Kl : Kualitatif

1. Informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar. Jadi dia adalah orang yang memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2001). Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purworejo yang terkait dengan penyuluhan pertanian, kepala UPT Penyuluhan Pertanian Wilayah Ngombol, koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol, penyuluh pertanian yang bertugas di Kecamatan Ngombol, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Ngombol, ketua kelompok tani, petani, pedagang saprodi, ketua umum PKK, dan ketua lumbung desa. Semua informan tersebut merupakan

sumber yang dimintai informasinya secara mendalam tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol.

2. Arsip atau Dokumen

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Keduanya dapat dinyatakan sebagai rekaman atau sesuatu yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu dan dapat secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian (Sutopo, 2002). Adapun arsip atau dokumen yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Purworejo Dalam Angka, Kecamatan Ngombol Dalam Angka dan arsip atau dokumen yang ada pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol yang berupa program penyuluhan, dan daftar kelompok tani pelaksana SLPTT masa tanam 2009. Selain itu, ada juga arsip BPPKP Kabupaten Purworejo yang berupa surat tugas, petunjuk teknis, BPPKP Kabupaten Purworejo dan daftar kelompok tani dan gapoktan di Kecamatan Ngombol serta arsip dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo yang berupa Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima BLBU Padi dan Kedelai Tahun Anggaran 2009 dan lokasi penerima JIDES/JITUT di Kecamatan Ngombol.

E. Teknik Pengumpulan Data

Goetz dan Le Compte (1984) dalam Sutopo (2002) menyatakan strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan metode non interaksi meliputi kuisioner, mencatat dokumen atau arsip (*content analysis*) dan juga observasi tak berperan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan *content analysis*.

1. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau yang sering disebut sebagai wawancara mendalam. Sutopo (2002) memaparkan bahwa wawancara ini dilakukan dalam keadaan peneliti tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open ended* dan mengarah pada kedalaman informasi. Untuk menjaga agar pokok-pokok pertanyaan penting tidak terlewatkan, maka dalam wawancara digunakan semacam pedoman dalam wawancara atau dapat juga disebut sebagai petunjuk wawancara. Moleong (2007) menjelaskan bahwa petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Jenis observasi yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu observasi berperan pasif di mana keberadaan peneliti disadari oleh pihak yang diteliti tetapi peneliti hanya sebatas sebagai pengamat (Sutopo, 2002). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Kegiatan ini juga dilakukan bersamaan dengan wawancara dengan informan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan daerah di Kecamatan Ngombol, sarana dan prasarana yang ada di BPK Ngombol, metode penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ngombol, materi penyuluhan, dan perubahan perilaku petani yang terjadi di Kecamatan Ngombol setelah adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Adapun instrumen yang dibutuhkan antara lain adalah kamera sebagai alat dokumentasi.

3. *Content Analysis*

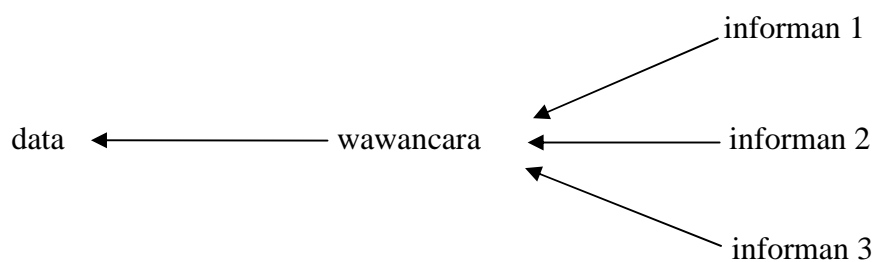
Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya dilakukan dengan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau dinamakan “kajian isi”. Weber dalam Moleong (2001) menyatakan bahwa kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sutopo (2002) mengemukakan bahwa *content analysis* merupakan kegiatan mencatat isi penting yang tersurat dari dokumen dan arsip kemudian dapat memaknai isi yang tersirat didalamnya. Oleh karena itu dalam menghadapi beragam arsip atau dokumen tertulis sebagai sumber data, peneliti harus bisa bersikap kritis dan teliti. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini yaitu Kabupaten Purworejo Dalam Angka, Kecamatan Ngombol Dalam Angka dan arsip atau dokumen yang ada pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol yang berupa program penyuluhan, daftar kelompok tani dan gapoktan di BPK Ngombol, Surat Tugas dan Petunjuk Teknis BPPKP Kabupaten Purworejo, serta Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima BLBU Padi dan Kedelai Tahun Anggaran 2009.

F. Validitas Data

Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data. Cara-cara tersebut antara lain berupa teknik triangulasi dan reвью informan. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik simpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 2002). Ada empat macam triangulasi yang dikemukakan Patton (1984) dalam Sutopo (2002), yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis

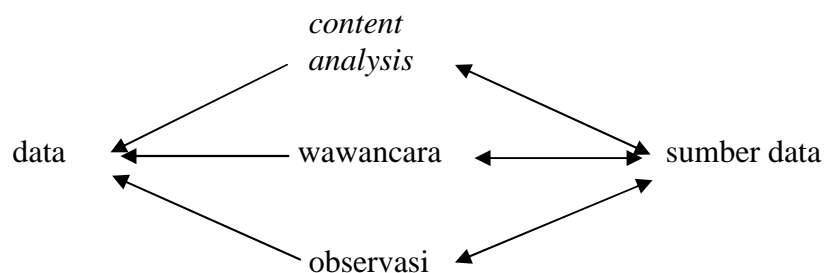
(*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).

Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data yaitu di dalam mengumpulkan data, peneliti wajib menggunakan data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Adapun bagan triangulasi data dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Bagan Triangulasi Data

Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data yang sejenis tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Di sini yang ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. Adapun bagan triangulasi metode dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Bagan Triangulasi Metode

Pengembangan validitas jugadilakukan dengan cara melakukan reviu informan. Pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang cukup lengkap dan berusaha menyusun sajian datanya walaupun mungkin masih belum utuh

dan menyeluruh, maka unit-unit laporan yang telah disusunnya perlu dikomunikasikan dengan informannya, khususnya yang dipandang sebagai informan pokok (*key informan*). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui mereka.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2007). Terkait dengan itu, Miles dan Huberman (1984) dalam Sutopo (2002) menyebutkan bahwa dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasinya. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisisnya.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun (Sutopo, 2002).

2. Sajian Data

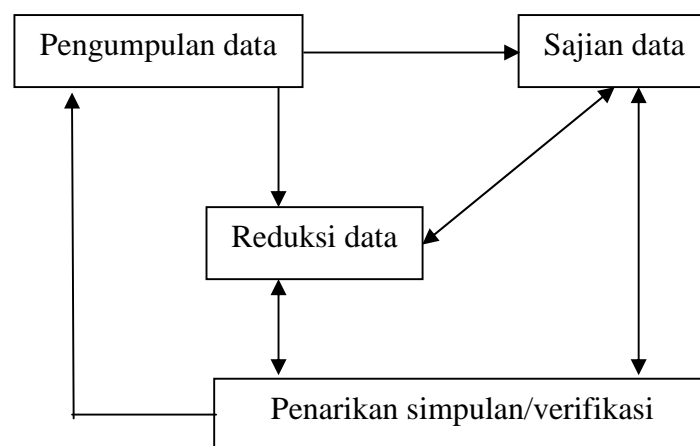
Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan menganalisisnya. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis

matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya (Sutopo, 2002).

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya (Sutopo, 2002).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif yaitu aktivitas dari ketiga komponen analisis yang telah dijelaskan di atas dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus.



Gambar 4. Model Analisis Interaktif (Sutopo, 2002)

Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari dua data tersebut peneliti menyusun rumusan

penelitiannya secara singkat berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti inti pemahaman segala peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan penelitiannya supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot sajian yang diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat mendukung kekuatan sajian data.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Alam

1. Kondisi Geografi dan Topografi

Kecamatan Ngombol merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak di Kabupaten Purworejo yaitu sejumlah 57 desa. Kecamatan Ngombol terletak di antara 109°47'28" bujur timur, 110°8'20" bujur timur, 7°32' lintang selatan, dan 7°54' lintang selatan. Tinggi ibukota Kecamatan Ngombol dari permukaan laut yaitu 12 m. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten sejauh 15,25 km ke arah utara. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ngombol meliputi :

Sebelah Utara : Kecamatan Banyuurip
Sebelah Selatan : Samudra Hindia
Sebelah Barat : Kecamatan Grabag
Sebelah Timur : Kecamatan Purwodadi

2. Luas dan Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Kecamatan Ngombol adalah 5.523,926 Ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, bangunan/pekarangan, hutan, dan lainnya. Keterangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4. Luas dan Tata Guna Lahan di Kecamatan Ngombol

No.	Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Tanah Sawah	3416,125	61,84
2.	Tanah Kering	1415,426	25,62
3.	Bangunan/Pekarangan	295,919	5,36
4.	Hutan	36,00	0,65
5.	Lainnya	360,456	6,53
JUMLAH		5.523,926	100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan di Kecamatan Ngombol berupa tanah sawah yaitu sebesar 61,84%. Adapun luas tanah sawah menurut jenis irigasi di Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 5. Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kecamatan Ngombol

No.	Jenis Irigasi	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Irigasi Teknis	1.120,665	32,80
2.	Irigasi Setengah Teknis	511,763	14,98
3.	Irigasi Sederhana	888,029	26,00
4.	Tadah Hujan	895,668	26,22
JUMLAH		3.416,125	100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah sawah di Kecamatan Ngombol sudah diairi dengan saluran irigasi yaitu irigasi teknis sebesar 32,80%, irigasi setengah teknis sebesar 14,98%, irigasi sederhana 26% sedangkan sisanya, sebanyak 26,22% masih berupa sawah tadah hujan. Dengan adanya saluran irigasi tersebut, maka kebutuhan air untuk berbagai keperluan usahatani di Kecamatan ngombol akan tercukupi sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produksi pertanian.

B. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Ngombol yaitu sejumlah 37,318 jiwa yang terdiri dari 18.208 laki-laki dan 19.110 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 95%. Untuk tingkatan umurnya dapat diamati pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Kelompok Penduduk Menurut Umur di Kecamatan Ngombol

No	Umur	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	1.280	3,43
2.	5 – 9	2.635	7,06
3.	10 – 14	3.133	8,40
4.	15 – 19	3.212	8,61
5.	20 – 24	3.180	8,52
6.	25 – 29	2.136	5,72
7.	30 – 34	2.186	5,86
8.	35 – 39	2.327	6,24
9.	40 – 44	2.654	7,11
10.	45 – 49	2.607	6,99
11.	50 – 54	2.446	6,55
12.	55 – 59	1.870	5,01
13.	60 – 64	1.459	3,91
14.	65+	6.193	16,60
JUMLAH		37.318	100

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2008

Biro Pusat Statistik *dalam* Mantra (2008) menetapkan bahwa mulai tahun 2008, batas penduduk usia kerja di Indonesia yaitu pada usia 15-64 tahun. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif yang terdapat di Kecamatan Ngombol adalah sebesar 27210 jiwa atau 72,92% dari total penduduk di Kecamatan Ngombol. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi tersebut merupakan suatu modal yang dapat menunjang pembangunan daerah di wilayah tersebut.

Dari tabel 6 juga dapat dihitung rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio* atau DR) Kecamatan Ngombol. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} DR &= \frac{\text{Penduduk umur (0 - 14 th)} + \text{Penduduk umur 65th} +}{\text{Penduduk umur (15 - 64)th}} \times k \\ &= \frac{13.259}{27.210} \times 100 \\ &= 48,7 \end{aligned}$$

DR sebesar 48,7 berarti tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 49 penduduk tidak produktif.

2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah akan berpengaruh dalam kualitas sumber daya manusia yang merupakan subyek sekaligus sebagai obyek dalam pembangunan di daerah tersebut. Tingkat pendidikan para kepala keluarga di Kecamatan Ngombol sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ngombol

No	Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Tidak tamat SD	1.867	17,58
2.	Tamat SD-SLTP	5.933	55,86
3.	Tamat SLTA	2.418	22,77
4.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	403	3,79
Jumlah		10.621	100

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ngombol

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 17,58% kepala keluarga di Kecamatan Ngombol yang tidak sekolah sedangkan sisanya telah memiliki pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran sebagian besar kepala keluarga di Kecamatan Ngombol akan arti penting pendidikan sudah cukup baik.

C. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Tersedianya lahan pertanian yang luas di Kecamatan Ngombol merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan sektor pertanian di Kecamatan Ngombol. Untuk tanaman padi, Kecamatan Ngombol merupakan sentra produksi padi dan lumbung gabah Kabupaten Purworejo karena produktivitas padi Kecamatan Ngombol paling tinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo. Produktivitas padi pada tahun 2008 mencapai 6,104 ton/Ha dengan luas tanaman padi 6.634 Ha. Harga gabah kering giling tahun 2008 tertinggi mencapai Rp 300.000,00/kuintal.

Luas panen tanaman jagung tahun 2008 adalah 260 Ha dengan produktivitas 7 ton/Ha. Sentra produksi jagung di Kecamatan Ngombol adalah di wilayah selatan. Harga jagung pipil tertinggi tahun 2008 yaitu Rp 2.500,00/kg, tercapai pada Bulan Oktober 2008. Selain kedua jenis tersebut, komoditas pertanian lain yang terdapat di Kecamatan Ngombol yaitu ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, cabe, dan terong. Luas areal panen dan produksi tanaman di Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Luas Tanam Menurut Komoditas di Kecamatan Ngombol

No	Komoditas	Luas lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Padi	6.634	40.494	6,104
2.	Jagung	260	1.820	7
3.	Ketela pohon	45	675	15
4.	Ketela rambat	15	73	4,87
5.	Kacang tanah	24	50	2,08
6.	Kacang hijau	7	6	0,86
7.	Cabe	30	32,20	1,07
8.	Terong	49	54,70	1,12

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2008

Komoditas ternak yang terdapat di Kecamatan Ngombol yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam buras, dan itik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Ternak Menurut Jenisnya di Kecamatan Ngombol

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Sapi	652
2.	Kerbau	76
3.	Kambing	4.286
4.	Ayam buras	29.107
5.	Itik	7.216

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2008

Kecamatan Ngombol juga merupakan salah satu kecamatan penghasil ikan di Kabupaten Purworejo, terutama untuk ikan laut karena Kecamatan Ngombol merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut dan mempunyai dua dermaga ikan yaitu di Desa Keburuhan dan Desa Malang. Hasil tangkapan ikan laut pada tahun 2008 mencapai 20.866 kg, sedangkan tambak dan perikanan air tawar menghasilkan 40.015 kg ikan.

D. Keadaan Sarana Perekonomian

Tersedianya sarana perekonomian di suatu wilayah sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk di wilayah tersebut. Adapun sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Ngombol yaitu 5 unit pasar umum, 322 kios/warung, 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 13 unit kios saprodi, dan 39 unit penggilingan padi. Industri yang berkembang di Kecamatan Ngombol yaitu industri kecil rumah tangga yang didominasi industri gula merah dan sektor jasa seperti penjahit, fotocopy, bengkel, dan salon. Selain itu, Kecamatan Ngombol juga ditunjang dengan lembaga keuangan yang berupa 1 unit BKK, 3 unit BRI UD, 2 unit KUD, 2 unit BPD, dan 57 lumbung desa.

E. Keadaan Kelembagaan Penyuluhan

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ngombol merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purworejo. Kelembagaan ini didirikan pada masa Orde Baru dengan nama Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP). Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 pada tanggal 18 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo maka dibentuklah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purworejo yang kemudian disusul dengan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian yang membawahi dua kecamatan dan perubahan nama BPP menjadi BPK.

Jumlah desa di wilayah BPK Ngombol yaitu sebanyak 57 desa. Kelembagaan pelaku utama yang ada di Kecamatan Ngombol terdiri atas 147 kelompok tani, yang terdiri dari 136 kelompok tani dewasa, 8 wanita tani, dan 3 kelompok pemuda. Selain kelompok tani, di Kecamatan Ngombol juga telah terbentuk 11 Gapoktan. Dari 57 Desa yang ada dibagi menjadi 17 wilayah binaan (wibi) penyuluh pertanian di mana masing-masing wilayah binaan terdiri atas tiga hingga empat desa. Masing-masing wilayah binaan dibawah oleh satu orang penyuluh pertanian. Berdasarkan Surat Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Nomor : 800/296/2009 tanggal 28 Februari 2009, tim penyuluh pertanian yang ada di BPK Ngombol adalah sebagai berikut :

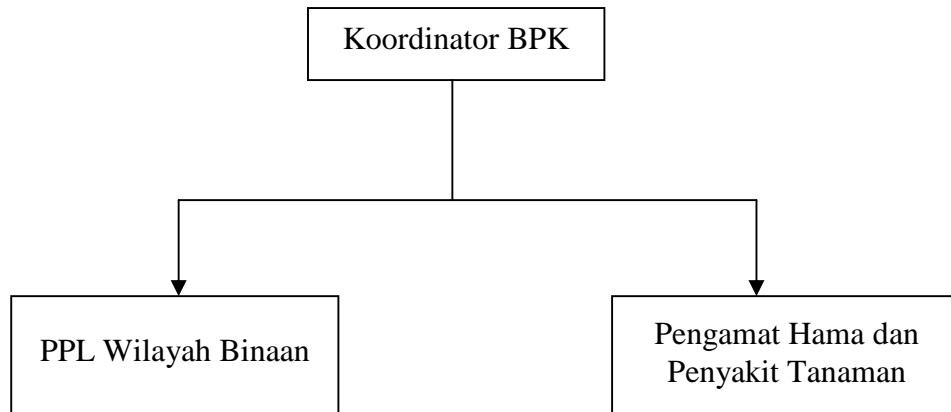
Tabel 10. Daftar Penyuluh Pertanian Lapangan BPK Ngombol

No.	Nama Penyuluh	Jabatan Dalam Dinas	Wilayah Binaan	Desa
	Soepangat, STP NIP. 080 046 121 Penata/ IIIc	Kelompok Fungsional	Koordinator	-
	Siti Lestari, SP	THL	Ngombol	Ngombol Joso Candi
	Suswito Prayogo, A.Md	THL	Kuwukan	Kuwukan Kalitanjung Kedondong
	Sri Mulyaningsih, STP NIP. 080 041 086 Penata/ IIIc	Kelompok Fungsional	Wonosri	Wonosri Jeruken Tanjungrejo
	Wasitun	THL	Rasukan	Rasukan Laban Wonosri
	Ngadiyanto	THL	Ngentak	Ngentak Girirejo Wero

R. Budiyo	THL	Pagak	Pagak Malang Keburuhan
Kusnadi, A.Md NIP. 080 074 876 Penata Muda Tingkat I/ IIIb	Kelompok Fungsional	Depokrejo	Depokrejo Kesidan Wonoroto Pejagran
Siti Suryani	THL	Kaliwungu Kidul	Kaliwungu Kidul Kaliwungu Lor Awu-Awu Kumpulsari
Roy Joko Mulyono	THL	Ringgit	Ringgit Tunjungan Wasiat
Teguh	THL	Briyan	Briyan Susuk Karang Talun
Umiyatun W, STP NIP. 080 086 473 Penata/ IIIc	Kelompok Fungsional	Mendiro	Mendiro Jombang Klandaran
Sumilah, STP NIP. 080 086 849 Penata Muda Tk I/ IIIb	Kelompok Fungsional	Walikoro	Walikoro Pulutan Sruwoh Kembangkuning
Heriyanto	THL	Singkil Wetan	Singkil Wetan Singkil Kulon Wonoboyo
Sri Linangsih	THL	Curug	Curug Tumenggungan Wingkoharjo
Siti Amirotnun	THL	Wunut	Wunut Sumberejo Cokroyasan Bojong
Sukasmi	THL	Piyono	Piyono Tanjung Sekar Seboropasar
Trenggono, A.Md NIP. 080 046 120 Penata Muda/ IIIa	Kelompok Fungsional	Wingko Sigromulyo	Wingko Sigromulyo Wingko Sanggrahan Wingko Tinumpuk Wingko Mulyo

Sumber Data : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, 2008

Selain mendapatkan tambahan tenaga penyuluh yang berupa Tenaga Harian Lepas (THL), BPK Kecamatan Ngombol juga mendapatkan tambahan seorang Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman sehingga total tenaga penyuluh yang ada di BPK Ngombol adalah 19 orang. Adapun struktur organisasi BPK Ngombol dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol

Gedung BPK Ngombol masih bergabung dengan Kantor Kecamatan Ngombol yang berlokasi di Desa Ngombol. Untuk saat ini, para penyuluh pertanian sudah mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk pengadaan gedung sendiri yang terpisah dari kantor kecamatan. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di BPK Ngombol yaitu 3 unit kendaraan dinas, 1 unit timbangan, 1 unit pengukur pH tanah, tabloid Sinar Tani, kalender, 2 unit almari, 1 papan kerja BPK, 9 unit meja, 13 unit kursi, dan 1 unit jam dinding. Sarana yang berasal dari pemerintah hanyalah kendaraan dinas, tabloid Sinar Tani, alat ukur pH tanah yang sudah dalam kondisi rusak, dan timbangan, sedangkan sarana dan prasarana lainnya merupakan hasil dari swadaya penyuluh di BPK Ngombol.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Komponen Sistem Penyuluhan Pertanian

a. Kebijakan Pemerintah

Salah satu syarat dan faktor pelancar pembangunan pertanian adalah kebijakan pemerintah untuk pembangunan pertanian dan penjabarannya oleh aparat pemerintah di tingkat regional dan lokal, serta langkah-langkah pelaksanaannya yang telah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di suatu daerah harus mengacu pada kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan pertanian yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan pemerintah yang terdapat di Kecamatan Ngombol yaitu program peningkatan kesejahteraan petani; program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan perkebunan; program peningkatan produksi pertanian, perikanan, perkebunan yang didukung dengan adanya program-program pemerintah seperti Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), dan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES)/Jaringan Tersier Usahatani (JITUT). Terkait program BLBU, Kecamatan Ngombol mendapatkan bantuan benih padi in hibrida varietas Ciherang sebanyak 25 ton untuk luasan 1000 Ha yang dibagikan kepada 25 desa. BLBU padi in hibrida ini dibagikan untuk rencana sebar pada minggu pertama Bulan Maret tahun 2009. Selain benih padi in hibrida, Kecamatan Ngombol juga mendapatkan BLBU untuk benih padi hibrida varietas Intani II sebanyak 1,5 ton untuk luasan 100 Ha yang juga dibagikan kepada 25 desa di kecamatan tersebut. BLBU padi hibrida ini dibagikan untuk rencana sebar pada minggu pertama Bulan September tahun 2009.

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo kini sudah mulai melaksanakan program pengelolaan lahan pertanian dengan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Dengan teknologi ini, petani dianjurkan untuk memenuhi semua unsur, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan benih, cara tanam bibit, pemupukan dan pemberantasan hama. Kelompok tani pelaksana SLPTT di Kecamatan Ngombol masa tanam 2009 adalah 40 kelompok tani untuk padi in hibrida varietas Ciherang. Masing-masing kelompok tani mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp 2.645.000,00 yang digunakan untuk membiayai demplot SLPTT yaitu pembelian benih, pupuk kimia, pupuk organik, dan pertemuan kelompok tani. Dana tersebut langsung disalurkan pemerintah ke rekening kelompok tani.

JIDES/JITUT merupakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif yang melibatkan petani mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan adanya partisipasi tersebut, maka diharapkan kebijakan ini akan tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan petani dan akan menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dalam diri petani terhadap hasil pembangunan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan hasil usahatani. Penentuan lokasi penerima program dilakukan berdasarkan pengajuan proposal oleh kelompok tani dengan pengesahan desa. Mekanisme penyaluran dananya langsung ditransfer oleh pemerintah ke rekening kelompok tani dengan jumlah dana sebesar 25 juta/kelompok tani. Dana tersebut merupakan dana stimulan, dalam artian berupa bantuan dalam bentuk rangsangan pengadaan bahan dan alat untuk mempercepat, mempermudah, atau menyempurnakan kegiatan fisik. Selanjutnya, dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan atau material bangunan dan upah tenaga kerja. Adapun desa-desa yang pernah menjadi sasaran

program JIDES/JITUT di Kecamatan Ngombol yaitu Desa Pejagran, Kumpulsari, dan Wingko Sigromulyo.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga ikut berperan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol. Peran pemerintah daerah tersebut berupa pemberian pembinaan yang berupa pelatihan-pelatihan, dan pelaksanaan peran transpemda seperti kerjasama dan koordinasi, karena tanpa peran transpemda tersebut program-program pemerintah tidak akan berjalan lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan fasilitas-fasilitas yang berupa traktor dan pompa air untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

b. Sasaran Penyuluhan Pertanian

Penerima manfaat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol adalah para petani, kelompok tani, pedagang saprodi, dan wanita tani. Dalam keterlibatannya dalam penyuluhan pertanian, manfaat-manfaat yang mereka dapatkan yaitu didapatkannya informasi tentang teknologi baru dan program-program pemerintah dalam bidang pertanian, informasi tentang cara peningkatan produksi pertanian, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang pertanian, mempermudah pemasaran, serta mempererat suasana kerjasama dan persaudaraan antaranggota kelompok tani. Sasaran utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol adalah petani dan keluarganya sedangkan yang menjadi sasaran antara adalah pelaku usaha seperti agen pemasaran dan pengepul, para formulator pupuk, dan wanita tani.

Sasaran penyuluhan di Kecamatan Ngombol memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung tercapainya tujuan penyuluhan pertanian. Potensi tersebut yaitu rata-rata petani di Ngombol adalah petani yang ulet dan antusias terhadap inovasi yang ditawarkan dalam penyuluhan pertanian, dan mempunyai semangat kerja yang tinggi, baik

itu dalam penanaman padi maupun produk hortikultura¹. Namun, di balik potensi tersebut, keterbatasan modal, sarana prasarana, dan ketergantungan kepada bantuan dari pemerintah merupakan suatu kekurangan yang masih terdapat dalam sasaran penyuluhan di Kecamatan Ngombol hingga saat ini.

c. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan penjelasan para informan, kelembagaan penyuluhan pemerintah yang ada di Kecamatan Ngombol untuk saat ini adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)². Akan tetapi keberadaan BPK tersebut hanya diketahui oleh penyuluh pertanian sedangkan informan lainnya terutama petani belum mengetahui tentang kelembagaan tersebut. Hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa penyuluh pertanian merupakan petugas yang juga menyatu dengan petugas kantor kecamatan dan tidak memiliki bentuk kelembagaan tersendiri. Adapun kekurangan dari BPK selaku kelembagaan penyuluh pemerintah yaitu dana dan sarana prasarana yang ada dalam kelembagaan masih kurang³. Sedangkan kelebihanannya adalah tenaganya sudah banyak, sehingga pembagian wilayahnya menjadi semakin ringan dan walaupun dana dan fasilitas kurang tetapi penyuluhan tetap bisa berjalan. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan, di Kecamatan Ngombol belum ditemukan adanya kelembagaan penyuluh swasta dan swadaya.

Bentuk kelembagaan pelaku utama di Kecamatan Ngombol adalah kelompok tani, gapoktan, wanita tani. Berdasarkan data dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo,

¹ Seperti halnya diungkapkan oleh Ibu Umiyatun Wijayanti selaku PPL BPK:

“Jenis tanaman yang ada di Kecamatan Ngombol itu beragam dan lahannya cukup luas. Petani di sini lebih ulet terutama dalam menghadapi musim kemarau. Di musim kemarau ini sudah memanfaatkan sumber daya pertanian semaksimal mungkin dengan adanya pelaksanaan IP300” (wawancara 19 Oktober 2009).

² Hal tersebut seperti penjelasan yang diberikan KJF Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purworejo, Bapak Kasikin :

“Bentuknya berupa Balai Penyuluhan Kecamatan atau BPK di mana BPK membawahi 1 kecamatan. Untuk Ngombol mempunyai lima sampai delapan wilayah binaan penyuluh atau wibi. Wibi tersebut terdiri atas kelompok-kelompok tani. Dua sampai tiga kelompok tani mempunyai gapoktan” (wawancara 7 September 2009).

³ Bapak Kasikin memberikan keterangan terkait hal tersebut :

“.... itu sesuai dengan kemampuan daerah karena Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang PADnya tidak terlalu besar” (wawancara 7 September 2009).

kelembagaan pelaku utama yang ada di Kecamatan Ngombol terdiri atas 147 kelompok tani, yang terdiri dari 136 kelompok tani dewasa, 8 wanita tani, dan 3 kelompok pemuda. Dari 147 kelompok tani tersebut, 72 diantaranya berada pada kelas kelompok tani pemula, 72 kelompok ada pada kelas kelompok tani lanjut, sedangkan sisanya sebanyak 3 kelompok sudah termasuk ke dalam kelas kelompok tani madya. Selain kelompok tani, di Kecamatan Ngombol juga telah terbentuk 11 Gapoktan. Kelembagaan tersebut tersebar di 57 desa yang merupakan wilayah Kecamatan Ngombol.

Kekurangan yang masih terdapat dalam kelembagaan tersebut yaitu terkait modal dan sarana prasarana pertanian baik itu kelompok tani maupun gapoktan sehingga gapoktan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anggotanya, kurangnya kesadaran anggota terkait banyak hal yang salah satunya adalah kesadaran untuk berorganisasi, dan adanya perbedaan pendapat antaranggota yang dapat menimbulkan konflik. Sedangkan kelebihan yang dimilikinya yaitu kelembagaan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh modal usaha dan mengurangi resiko usaha para anggotanya, mempermudah dalam perolehan bantuan dari pemerintah terutama bantuan modal dan fasilitas, dan mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani.

d. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Ketenagaan penyuluhan di Kecamatan Ngombol terdiri atas tiga macam penyuluh pertanian, yaitu penyuluh pertanian pemerintah yang terdiri dari penyuluh PNS dan THL dan bertugas di BPK Ngombol, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluh swasta yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Sedangkan penyuluh

swadaya yaitu pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Adapun perbedaan dari ketiga penyuluh tersebut dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Perbedaan Penyuluh Pemerintah, Swasta, dan Swadaya

Dimensi	Penyuluh Pemerintah	Penyuluh Swasta	Penyuluh Swadaya
1. Karakteristik	Lebih kontinyu dalam memberikan pelayanan kepada petani	Tidak kontinyu karena tujuan utamanya adalah mempromosikan produk	Hampir sama dengan penyuluh pemerintah tetapi cakupannya lebih sempit yaitu untuk wilayahnya sendiri
2. Frekuensi kunjungan kepada petani	Rata-rata empat kali seminggu	Sesuai dengan kepentingan mereka	Bisa sewaktu-waktu
3. Metode penyuluhan yang digunakan	Ceramah, diskusi, kunjungan, sekolah lapang, demonstrasi, dan perlombaan	Ceramah, diskusi, LCD, demonstrasi	Ceramah, diskusi, demonstrasi, kunjungan
4. Keunggulan	Lebih unggul dari segi informasi teknologi	Fasilitas penyuluhan lebih lengkap	Mempunyai pengalaman riil dan lebih dekat dengan petani karena setiap hari selalu ada di wilayah tersebut
5. Kelemahan	Sarana prasarana untuk penyuluhan masih kurang	Penyuluhannya tidak ada keberlanjutan dan hanya sekedar promosi produk	Belum mendapat kepedulian dan perhatian dari pemerintah daerah

Jumlah penyuluh di BPK Ngombol adalah 18 penyuluh pertanian yang terdiri dari 6 penyuluh PNS dan 12 THL TBPP serta 1 orang pengamat hama dan penyakit tanaman. Masing-masing penyuluh memegang wilayah binaan yang terdiri dari 3-4 desa. Koordinator BPK tidak mempunyai wilayah binaan dan bertugas mengkoordinir penyuluh pertanian di wilayah binaannya masing-masing. Kelemahan dari tenaga penyuluh pemerintah yaitu dana dan fasilitas yang dimiliki masih

kurang. Mereka juga kalah pengalaman dengan petani, apa yang mereka sampaikan kebanyakan hanyalah teori. Sedangkan kelebihanannya yaitu penyuluh pemerintah memiliki pengetahuan yang mumpuni dan bermanfaat bagi petani dalam penyelesaian masalah di lapangan maupun dalam upaya peningkatan hasil produksinya⁴. Penyuluh pemerintah juga lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan kepada petani.

Di Kecamatan Ngombol juga terdapat penyuluh swasta. Mereka merupakan agen dari produsen pupuk organik seperti NOS (Nutrisi Organik Super), produsen pestisida seperti Syngenta, dan produsen benih seperti JHS (Jagung Hibrida Sulawesi), dan PT. Branita Sendiri. Kelemahan penyuluh swasta yaitu penyuluhan yang mereka lakukan tidaklah secara kontinyu dan lebih mengutamakan segi promosi, sedangkan kelebihan yang mereka miliki yaitu mereka dilengkapi dengan fasilitas penyuluhan yang lengkap dan modern seperti laptop dan LCD, memiliki modal yang besar, bersedia membagikan produknya kepada petani untuk dicoba, dan bersedia mengeluarkan dana untuk menggelar demplot. Dengan adanya demplot ini maka akan banyak petani yang percaya dan lebih mudah dalam menerima informasi yang diberikan oleh penyuluh swasta.

Selain penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta, di Kecamatan Ngombol juga terdapat penyuluh swadaya. Kelemahan penyuluh swadaya adalah belum adanya suatu perangsang dan kepedulian pemerintah terhadap mereka. Dalam hal ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 telah memberikan aturan tentang pembinaan penyuluh swadaya. Tetapi untuk selanjutnya, pelaksanaan Permentan ini diserahkan kepada daerah,

⁴ Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sujito :

“Penyuluh dari tim kecamatan bermanfaat sekali bagi kelompok tani. Secara otomatis walaupun penyuluhan yang mereka berikan kebanyakan hanyalah teori, dan petani memang lebih kaya pengalaman dari mereka tetapi bagaimanapun juga petani kan masih banyak kekurangannya. Sebagai contoh misalnya tanaman cabe buahnya banyak yang rontok atau terserang hama belalang, petani kan belum tahu harus berbuat apa. Di sini paling tidak tim penyuluh kecamatan kan lebih mumpuni dalam teknologi untuk pemberantasan hama tadi. Jadi pengetahuan yang disampaikan oleh mereka bermanfaat bagi para petani di sini” (wawancara tanggal 18 November 2009).

sedangkan Kabupaten Purworejo merupakan Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya tergolong kecil, jadi belum mampu untuk menindaklanjuti Permentan tersebut. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki penyuluh swadaya yaitu mereka punya pengalaman riil dan lebih dekat dan selalu berhubungan langsung dengan petani karena setiap hari mereka selalu ada di wilayah tersebut.

e. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sarana dan prasarana yang terdapat di BPK Ngombol yaitu 3 unit kendaraan dinas, 1 unit timbangan, 1 unit pengukur pH tanah, tabloid Sinar Tani, kalender, 2 unit almari, 1 papan kerja BPK, 9 unit meja, 13 unit kursi, dan 1 unit jam dinding. Sarana yang berasal dari pemerintah hanyalah kendaraan dinas, tabloid Sinar Tani, alat ukur pH tanah yang sudah dalam kondisi rusak, dan timbangan, sedangkan sarana dan prasarana lainnya merupakan hasil dari swadaya penyuluh yang dibeli dengan cara patungan. Gedung BPK sendiri hanyalah sebuah ruangan yang menjadi satu dengan kantor Kecamatan Ngombol. Gambaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Daftar Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol pada Tahun 2009

No.	Nama Barang	Jumlah Satuan	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Ruangan Kantor	± 48 m ²	√		Dari pemerintah
2.	Kendaraan Dinas	3 unit	√		Dari pemerintah
3.	Timbangan	1 unit	√		Dari pemerintah
4.	Pengukur pH Tanah	1 unit		√	Dari pemerintah
5.	Tabloid Sinar Tani	1 unit/bulan	√		Dari pemerintah
6.	Kalender	3 unit	√		Dari penyuluh swasta
7.	Almari	2 unit	√		Swadaya penyuluh
8.	Papan Kerja BPK	1 unit	√		Swadaya penyuluh
9.	Meja	9 unit	√		Swadaya penyuluh
10.	Kursi	13 unit	√		Swadaya penyuluh
11.	Jam Dinding	1 unit	√		Swadaya penyuluh
12.	Buku Harian Dinas	1 unit/penyuluh	√		Dari pemerintah

Sumber : Data Primer

Mekanisme penggunaan sarana terutama untuk kendaraan dinas yaitu langsung diserahkan pemerintah kepada penyuluh pertanian dengan syarat-syarat tertentu yaitu penyuluh PNS senior. Para penyuluh pemerintah tidak merasakan adanya kelebihan dari sarana prasarana

yang tersedia, sedangkan kekurangannya yaitu jumlahnya yang masih kurang mencukupi.

Untuk kedepannya, sarana dan prasarana yang diinginkan penyuluh pertanian BPK ngombol yaitu kendaraan dinas, lahan percontohan, gedung penyuluhan sendiri dan fasilitasnya, dan alat peraga⁵. Untuk dapat memenuhi kekurangan dari sarana dan prasaran yang tersedia biasanya para penyuluh pemerintah membelinya secara swadaya dari hasil uang iuran para penyuluh pemerintah di BPK tersebut.

f. Pembiayaan Penyuluhan Pertanian

Pembiayaan penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan ngombol meliputi biaya personil untuk tenaga penyuluhan pertanian, biaya operasional penyuluh pertanian, dan biaya pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian untuk para penyuluh PNS yang mendapatkan kendaraan dinas. Selain pembiayaan tersebut, ada juga pembiayaan untuk program-program pemerintah yaitu SLPTT, BLBU, dan JIDES/JITUT. Sumber pembiayaan penyuluhan pertanian di BPK Ngombol berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut penjelasan Bapak Kasikin selaku KJF Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purworejo, sumber pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1) APBN

Merupakan sumber pembiayaan terbesar. Bentuknya berupa sarana, pupuk bersubsidi, dan program-program seperti BLBU dan lain sebagainya.

2) APBD

Terdiri atas APBD I dan APBD II.

⁵ Hal ini terungkap dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Ngadiyanto :

".... lahan percontohan untuk melaksanakan demplot, motor satu motor untuk satu penyuluh, gedung penyuluhan sendiri beserta fasilitasnya dan juga ruang untuk pertemuan. Kalau kita hanya swadaya terus ya bagaimana? Kita kan juga harus memikirkan keluarga" (wawancara 17 September 2009).

a) APBD I

Merupakan dana *sharing* dari APBN. Jadi APBD I berasal dari APBN. APBD I sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya Aksi Desa Mandiri Pangan, dan pembangunan BPP model.

b) APBD II

Istilahnya adalah dana pendampingan. Bentuknya misalnya bantuan transport kendaraan untuk penyuluh, JITUT/JIDES, dan PUAP. Program-program tersebut berasal dari APBN tetapi didampingi dengan APBD II.

3) DAK

Berasal dari pusat dan penggunaannya sudah ditentukan dari sana. Misalnya untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung BPK.

Menurut para informan, proporsi pembiayaan pemerintah daerah hanyalah sekitar 25% sedangkan sisanya, sekitar 75% berasal dari pemerintah pusat. Mekanisme pembiayaan untuk para penyuluh PNS termasuk biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas, dana disalurkan pemerintah pusat ke daerah untuk disalurkan ke para penyuluh PNS, sedangkan untuk para THL dana langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke masing-masing rekening THL. Sedangkan pembiayaan program-program pemerintah begitu masuk ke daerah, pembiayaan ditetapkan oleh tim satuan kerja kabupaten untuk dibuat perencanaan yang selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan kepada para petani. Untuk BLBU berasal dari pusat menuju ke propinsi baru masuk ke daerah. Pada SLPTT, dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani oleh pemerintah. Prioritas penggunaan biaya penyuluhan pertanian sudah langsung ditentukan dari pusat bersamaan dengan penyalurannya. Pembiayaan penyuluhan pertanian oleh pemerintah tersebut dirasakan penyuluh masih jauh dari cukup. Tetapi setidaknya, dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan

kepada para petani seperti untuk menggelar demplot sekaligus sebagai tambahan modal bagi para petani.

2. Peran Komponen Sistem Penyuluhan

a. Sasaran Penyuluhan

Sasaran penyuluhan pertanian berperan sebagai obyek dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di mana mereka adalah pihak yang akan menerima manfaat dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk terciptanya *better farming* dan *better living* dalam kegiatan usahatani. Sasaran penyuluhan merupakan pihak yang menerima manfaat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Adapun manfaat yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan di Kecamatan Ngombol dalam keterlibatan mereka dalam penyuluhan pertanian yaitu didapatkannya informasi tentang teknologi baru dan program-program pemerintah dalam bidang pertanian, informasi tentang cara peningkatan produksi pertanian, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang pertanian, mempermudah pemasaran, serta mempererat suasana kerjasama dan persaudaraan antaranggota kelompok tani.

b. Kelembagaan Penyuluhan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para informan, peran Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu memberikan informasi pertanian kepada petani, mengkoordinir program penyuluhan di masing-masing PPL untuk dijadikan program BPK, dan untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ngombol. Sedangkan peran kelembagaan pelaku utama yang dirasakan oleh petani dalam dalam keanggotaannya di kelembagaan tersebut yaitu sebagai wadah untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya terutama dalam bidang saprodi, sebagai wadah koordinasi para anggotanya, untuk penyusunan RDKK guna memenuhi kebutuhan kelompok, dan untuk mengajukan bantuan-bantuan dari pemerintah.

c. Ketenagaan Penyuluhan

Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa ketenagaan penyuluhan di Kecamatan Ngombol terdiri atas tiga jenis penyuluh yaitu penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Penyuluh pemerintah yang bertugas di Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol berperan sebagai motivator dan penyampai informasi atau program pemerintah kepada petani yang terkait dengan pertanian, kemajuan petani dan peningkatan produksi. Sebagai motivator penyuluh pemerintah berperan dalam memberikan motivasi kepada petani untuk terus berusaha meningkatkan produksi dan pendapatannya. Sebagai penyampai program pemerintah, penyuluh berperan sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara pemerintah dengan petani sehingga informasi program pemerintah dapat sampai kepada petani.

Penyuluh swasta berperan mengadakan kerjasama dengan petani dalam hubungan yang saling menguntungkan, mempromosikan produk mereka, dan menggelar demplot untuk produk yang ditawarkan, sedangkan penyuluh swadaya yang berperan membantu penyuluh pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada petani, sebagai motivator petani disekitarnya, sebagai tempat berdiskusi tentang masalah-masalah yang tengah dihadapi.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penyuluhan sangat berperan sebagai faktor yang mendukung kelancaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol. Ruangan kantor dan perlengkapannya berperan sebagai ruang kerja penyuluh pemerintah dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan. Adanya kendaraan dinas akan mempermudah mobilitas penyuluh dalam memberikan layanan penyuluhan kepada para petani. Tabloid Sinar Tani berperan sebagai sarana untuk mengakses berbagai informasi teknologi pertanian oleh para penyuluh. Sarana penyuluhan juga merupakan media yang akan sangat membantu dalam

pelaksanaan berbagai metode penyuluhan dalam menyampaikan materi penyuluhan kepada petani.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol. Dengan adanya pembiayaan yang efektif dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka kegiatan penyuluhan pertanian akan dapat berjalan dengan baik.

3. Proses Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

a. Program Penyuluhan

Programa penyuluhan pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol merupakan jabaran dari program tingkat kabupaten dan usulan dari kelompok tani di tingkat wilayah binaan. Di dalam program penyuluhan pertanian BPK Ngombol termuat latar belakang dan tujuan penyusunan program penyuluhan, keadaan umum wilayah Ngombol kaitannya dengan sektor pertanian, penerapan teknologi pada tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta kebijakan pembangunan pertanian. Selain itu juga termuat tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol, permasalahan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik dari aspek sosial, ekonomi maupun teknis, dan cara mencapai tujuan yang terangkum dalam rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian di BPK Ngombol untuk masa satu tahun yang akan datang.

Langkah penyusunan program penyuluhan di BPK Ngombol yaitu dengan mengumpulkan kontak tani untuk dimintai keterangan tentang gambaran keadaan wilayahnya, masalah-masalah yang tengah dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan usahatani para petani di daerahnya, serta usulan materi atau kegiatan penyuluhan yang menurut mereka perlu untuk diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan perubahan produksi dan pendapatan para petani di daerahnya. Dari

keterangan para kontak tani tersebut, maka selanjutnya akan dibuat skala prioritas (*impact point*) dan disusun oleh para penyuluh pertanian. Programa penyuluhan juga dibuat dengan mengumpulkan RKPP dari masing-masing penyuluh pertanian dari wilayah binaannya. Hal penting yang ingin dicapai dengan pembuatan programa penyuluhan pertanian adalah terciptanya kepuasan petani atas kegiatan penyuluhan yang diadakan. Langkah yang ditempuh Balai Penyuluhan Kecamatan Ngombol untuk mengakomodasi kebutuhan petani dalam programa penyuluhan pertanian tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para petani untuk dapat mencapai kepuasan mereka. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan baik melalui pendekatan perseorangan, pendekatan kelompok, maupun dengan pendekatan secara massal.

Tujuan penyusunan programa penyuluhan yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Penyuluh di tingkat Wibi dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan supaya lebih efektif dan efisien⁶. Tujuan penyuluhan pertanian BPK Ngombol yang termuat dalam programa penyuluhan BPK Ngombol adalah sebagai berikut :

- 1.) Merubah sikap dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani.
- 2.) Menumbuhkembangkan kelompok tani.
- 3.) Meningkatkan peran kontak tani/penyuluh swakarsa.
- 4.) Meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses kelembagaan pemasaran, informasi, permodalan dan sarana produksi.
- 5.) Meningkatkan kemitraan petani/kelompok dengan pihak swasta/pemerintah.
- 6.) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani.
- 7.) Melestarikan sumber daya alam.

⁶ Bapak Ngadiyanto memberikan pernyataan sejalan dengan kedua tujuan tersebut :
“Supaya penyuluhan kita terarah. Jadi dengan adanya target yang ingin kita capai yang termuat dalam programa penyuluhan pertanian akan membuat penyuluhan yang kita lakukan kepada petani menjadi lebih terarah atau terencana” (wawancara 17 September 2009).

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh BPK Ngombol yaitu produktivitas padi 7 ton/Ha, IP 300%, tercukupinya gizi keluarga, produktivitas gula 8 kuintal/Ha, lahan bero tertanami jarak, tercukupinya daging sapi untuk kebutuhan lokal, dan tersedianya pupuk organik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian meliputi aspek sosial, ekonomi, dan teknis. Permasalahan dari aspek sosial meliputi lembaga kelompok tani yang belum dimanfaatkan secara optimal, peran serta perangkat desa kepada kelompok tani yang masih kurang, berkurangnya tenaga kerja muda di bidang pertanian, inisiatif kelompok yang belum menyeluruh mau membuat rencana kerja, kerjasama antara kelompok tani yang masih lemah, peranan KTNA dan penyuluh swakarsa yang masih kurang. Permasalahan dalam aspek ekonomi yaitu kurangnya kerjasama kelompok dalam pemasaran hasil, pemupukan modal kelompok yang masih kurang, hubungan kelompok tani dengan lembaga lain masih kurang, belum adanya lembaga yang mau menampung dan memasarkan hasil pertanian, kelompok tani belum berfungsi sebagai pemasar hasil, dan posisi tawar petani yang sangat lemah. Sedangkan permasalahan teknis meliputi penggunaan benih berlabel masih 25% dari petani, pupuk organik yang digunakan di lahan sawah masih sangat rendah, lahan pekarangan banyak masih bero, PHT masih jarang dilaksanakan, dan rata-rata peternak ayam buras belum melaksanakan faksinasi.

Selama ini terdapat pembinaan dan pengawasan BPPKP dan UPT Penyuluhan Pertanian Wilayah Ngombol yang berupa pembinaan yang diberikan melalui training dan supervisi yang meliputi : pembuatan program penyuluhan sudah jadi atau belum, kapan diselesaikan, masalah yang dihadapi, dan upaya pemecahan masalah.

b. Mekanisme Kerja dan Metode

Mekanisme kerja penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Ngombol ada dua jalur, yaitu berasal dari atas dan dari bawah. Jalur yang berasal dari atas (sentralistik) yaitu berasal dari Dinas Pertanian menuju ke BPPKP yang selanjutnya akan disampaikan di masing-masing UPT untuk diberikan kepada para penyuluh pertanian di BPK. Terakhir, kegiatan penyuluhan pertanian akan disampaikan kepada para petani melalui pertemuan kelompok tani.

Selain mekanisme sentralistik, ada juga mekanisme yang berasal dari bawah atau partisipatif. Masalah atau usulan dari para petani disampaikan kepada penyuluh pertanian melalui pertemuan kelompok tani. Masalah atau usulan dari petani tersebut akan ditampung oleh BPK untuk disampaikan kepada UPT. Dari UPT, masalah dan usulan tersebut akan disampaikan kepada BPPKP dan atau Dinas Pertanian. Sedangkan mekanisme pelaporan kegiatan dari bawah ke atas adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan mengumpulkan dan atau merekap laporan dari penyuluh Wibi.
- 2) Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan menyampaikan laporan ke Kepala UPT Penyuluhan.
- 3) Kepala UPT Penyuluhan mengumpulkan dan atau merekap laporan dari Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan.
- 4) Setiap bulannya kepala UPT Penyuluhan menyampaikan laporan ke Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan (Urusan Sumber Daya Manusia Penyuluh) dalam bentuk sudah tersusun rapi.

Pihak yang berperan dalam mekanisme tersebut adalah Dinas Pertanian, BPPKP, UPT Penyuluhan Pertanian, BPK, penyuluh pertanian, kelompok tani, aparat kecamatan dan desa. Pembinaan dan pengawasan terkait mekanisme kerja hanya dilakukan kepada penyuluh pemerintah. Untuk pembinaannya ada training yang rutin diadakan setiap bulannya oleh kabupaten, sedangkan untuk pengawasannya ada

kegiatan supervisi dari supervisor UPT maupun supervisor kabupaten yang jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing supervisor. Selain itu, biasanya ada survey langsung dari Dinas Pertanian.

Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu ceramah, diskusi, demplot, sekolah lapang, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, perlombaan, dan demonstrasi cara, demonstrasi hasil, anjongsana dan anjangkarya. Metode yang dominan digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu ceramah, diskusi, dan kunjungan baik anjongsana maupun anjangkarya. Hal tersebut karena dana yang tersedia untuk melaksanakan metode penyuluhan sangat terbatas, jadi dengan penggunaan metode tersebut materi penyuluhan dapat tersampaikan kepada para petani dengan dana yang relatif murah. Pihak yang menentukan jenis metode penyuluhan yang akan digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian. Adapun yang menjadi dasar pemilihan metode penyuluhan oleh para penyuluh pertanian adalah media yang ada, jumlah sasaran, tingkat kesibukan petani⁷.

Para informan mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan sudah dapat mereka terima dengan baik. Terdapat pembinaan dan pengawasan oleh BPPKP dan UPT Penyuluhan Pertanian Wilayah Ngombol dalam penentuan dan penggunaan metode penyuluhan yaitu dalam bentuk monitoring dan evaluasi mengenai metode-metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

c. Materi Penyuluhan

Jenis materi yang disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu disesuaikan dengan musim, teknik budidaya komoditas agribisnis, hama dan penyakit tanaman,

⁷ Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Ngadiyanto.

"Keberadaan petaninya itu tingkat kesibukannya sejauh apa. Kalau petani di daerah selatan sana kalau disuruh kumpul saya kira mereka pasti pikir-pikir. Karena mereka orang sibuk, kita yang menemui mereka di lahan. Nanti kalau ada keluhan, kita bicarakan bersama-sama, kalau ada kekurangannya maka pertanyaan tersebut ditampung dulu untuk dicari solusinya" (wawancara 17 September 2009).

materi tentang program pemerintah seperti SLPTT, pengembangan pupuk organik, pembudidayaan tanaman padi dengan *System of Rice Intensification* (SRI), pembudidayaan tanaman cabe yang benar, dan pembuatan pupuk bokasi. Yang menjadi dasar pemilihan materi penyuluhan oleh penyuluh yaitu kondisi di lapangan dan kebutuhan petani. Jadi dalam memberikan penyuluhan kepada para petani, penyuluh harus memperhatikan musim. Misalnya pada musim penghujan, penyuluh memberikan penyuluhan tentang tanaman padi tetapi pada musim kemarau penyuluh memberikan materi tentang budidaya palawija dan hortikultura. Dengan begitu, petani akan tertarik dengan apa yang disampaikan penyuluh pertanian kepada mereka. Berdasarkan keterangan dari para informan, materi penyuluhan tersebut dirasakan telah sesuai dengan kebutuhan petani. Pembinaan dan pengawasan terkait materi penyuluhan pertanian hanya dilakukan untuk para penyuluh pemerintah. Pembinaan tersebut berupa training yang diadakan tiap bulan satu kali, sedangkan pengawasannya dalam bentuk supervisi baik dari UPT penyuluhan maupun dari habupaten.

d. Peran Serta dan Kerjasama

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol dapat berjalan karena adanya pran serta dari berbagai pihak. Bentuk dan pihak yang berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Bentuk Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngombol

No.	Pihak yang Berperan Serta	Bentuk Peran Serta
1.	Camat	Penanggung jawab kegiatan penyuluhan pertanian
2.	Kepala desa dan perangkatnya	Pendorong kelompok tani
3.	Ketua, pengurus dan anggota kelompok tani	Penerima informasi
4.	Penyuluh pertanian	Penyampai informasi
5.	Pedagang saprodi	Penyedia saprodi

Selain adanya peran serta dari berbagai pihak tersebut, maka diperlukan juga adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Sikap pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kunjungan-kunjungan mereka dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh kelompok tani dan ikut serta dalam memecahkan masalah yang ada, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok-kelompok tani, serta adanya pembinaan dan pengawasan kepada pedagang saprodi dalam penyaluran pupuk. Hal ini mengingat dalam penyaluran pupuk kepada petani, pedagang saprodi merupakan pihak yang kontak langsung dengan petani.

Di dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol juga menimbulkan beberapa jalinan kerjasama antara berbagai pihak sehingga tercipta keadaan yang saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bekerjasama. Jalinan kerjasama tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 14. Jalinan Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngombol

No.	Lingkup Kerjasama	Pihak-pihak yang Bekerjasama
1.	Pengadaan saprodi	Kelompok tani, penyuluh pertanian dan pedagang saprodi
2.	Pembiayaan penyuluhan	Penyuluh pemerintah, penyuluh swasta dan kelompok tani
3.	Pembuatan benih	Petani dan produsen benih
4.	Pemasaran hasil pertanian	Petani, agen pemasaran dan produsen benih

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa kerjasama yang terjalin dalam hal pengadaan saprodi terjadi antara petani yang tergabung dalam kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pedagang saprodi yaitu terkait dengan pembuatan RDKK. Kerjasama dalam hal pembiayaan dilakukan antara penyuluh pemerintah dengan penyuluh swasta dan kelompok tani. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian ketenagaan penyuluhan

pertanian bahwa penyuluh swasta memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyuluh pemerintah yaitu dalam hal permodalan dan fasilitas penyuluhan pertanian. Dengan adanya hubungan kerjasama dalam hal pembiayaan tersebut maka diharapkan dapat tercipta hubungan yang menguntungkan antara penyuluh swasta, penyuluh pemerintah, dan kelompok tani. Kerjasama dalam hal pembuatan benih dan pemasaran terjadi antara para petani dengan produsen benih dan agen pemasaran⁸. Kerjasama dalam hal pemasaran juga pernah dialami para petani di Desa Keburuhan dengan produsen benih kacang panjang dan PT. Branita Sendiri sebagai produsen benih jagung⁹. Dengan adanya kerjasama dalam pemasaran, maka petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena harga yang ditawarkan oleh agen pemasaran lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pasar lokal. Suasana kerjasama di antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat dikatakan sudah terjalin dengan baik. Di dalam hubungan kerjasama tersebut terdapat pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah yang dilakukan dalam bentuk adanya pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk oleh tim pengawas pupuk dari kecamatan dan pembinaan serta pengawasan oleh pihak yang diajak bekerjasama seperti agen pemasaran dan produsen benih.

⁸ Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Slamet yang merupakan ketua Kelompok Tani Lestari Desa Ringgit yang membudidayakan padi organik dengan sistem SRI :

"Kami bekerjasama dengan agen pemasaran, karena pasar kami dapat dikatakan pasar yang lain daripada yang lain. Dalam penentuan harga, yang saya alami selama ini, harga itu milik petani. Jadi yang menentukan harga adalah petani, tetapi ada dasarnya, tidak asal-asalan saja. Semua modal yang dikeluarkan dihitung, dan hasil panemnya juga dihitung. Kalau menurut perhitungan kami itu sekitar Rp 5.500,-/kg pada saat musim penghujan, tetapi pada saat musim kemarau bisa mencapai Rp 5.800,-/kg karena kami memakai pompa air. Lalu kami ingin minta keuntungan berapa, kami katakan ke konsumen. Dengan cara seperti itu, konsumen akan lebih gampang menerimanya. Konsumen ada yang mengambil sendiri tetapi ada juga yang minta diantarkan barangnya. Kalau yang minta diantarkan maka ongkos kirimnya kita bebaskan kepada pembeli. Harga berasnya saat ini untuk Sintanur dan Menthik Wangi mencapai Rp 7.000,-/kg sedangkan Jasmin mencapai Rp 8.000,-/kg karena nasinya lebih pulen" (wawancara 14 September 2008).

⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sujito :

"Kami pernah mengadakan kerjasama dengan PT Branita Sendiri untuk pembuatan benih jagung. Kami juga bekerjasama dalam pembuatan benih kacang panjang tetapi saya lupa nama PTnya. Masyarakat di sini merasa senang bekerjasama dengan mereka karena di samping hasilnya lumayan, harganya juga bagus. Itu sistemnya kerjasama. Yang usaha sini, tetapi penyandang dananya adalah sana. Jadi benih mereka yang menyediakan, kita yang mengelola tanaman sesuai kemauan mereka, dan setelah panen nanti hasilnya dijual kepada mereka dengan harga sesuai aturan yang sudah disepakati bersama dari awal" (wawancara 18 November 2009).

4. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu permasalahan dalam penerapan metode penyuluhan, permasalahan dalam pelaksanaan materi penyuluhan, permasalahan dalam penyaluran pupuk, dan permasalahan dalam hubungan kerjasama antara petani dengan agen pemasaran. Permasalahan yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan dan penerapan metode penyuluhan terkait dengan adanya keterbatasan dana dan sarana prasarana yang digunakan untuk mengaplikasikan metode penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada para petani. Selama ini, permasalahan tersebut diatasi penyuluh dengan menggunakan metode penyuluhan yang tidak memakan dana yang besar dan dapat dilakukan dengan fasilitas yang sederhana tetapi dinilai efektif dalam melakukan pendekatan atau menyampaikan materi penyuluhan kepada para petani. Langkah lain yang ditempuh yaitu dengan melakukan kerjasama dengan petani kaitannya dengan pembiayaan konsumsi pertemuan kelompok maupun dalam penyebaran informasi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Sebagian petani juga masih mengalami kesulitan dalam mempraktekkan materi yang disampaikan oleh para penyuluh. Kesulitan tersebut timbul karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh petani untuk mempraktekkan materi penyuluhan pertanian misalnya dalam hal dosis pupuk yang harus ditambahkan di lahan usahatani. Sebagian petani mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk yang dianjurkan oleh penyuluh untuk dapat mengoptimalkan hasil produksi usahatani mereka. Demikian juga dalam pengaplikasian teknologi baru yang diperkenalkan oleh penyuluh seperti cara penanaman padi dengan pola jajar legowo. Tetapi dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari petugas penyuluh, petani sedikit demi sedikit dapat mengatasi kesulitan tersebut.

Permasalahan dalam penyaluran pupuk yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan pupuk oleh petani juga merupakan

permasalahan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian¹⁰. Adapun cara yang dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mempertemukan pihak yang berkonflik. Dalam penyelesaian masalah tersebut, penyuluh pertanian memfasilitasi pertemuan antara pedagang saprodi, kelompok tani, maupun petugas pemerintah yang berkaitan dengan peredaran pupuk. Biasanya penyuluh pertanian akan memberikan usulan kepada Dinas Pertanian agar mengajukan waktu penyaluran pupuk kepada petani berdasarkan alasan yang terjadi di lapangan.

Permasalahan lain yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu permasalahan dalam hubungan kerjasama antara petani padi organik dengan agen pemasaran. Hal tersebut disebabkan karena kualitas beras organik yang tidak selalu sama sehingga agen pemasaran mengeluh kepada petani. Selama ini, langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan mendiskusikannya bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik.

5. Dampak Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I bahwa yang menjadi pelaksana utama dalam pembangunan pertanian adalah para petani yang mayoritas memiliki modal dan lahan yang terbatas serta lemah dalam pengetahuan, keterampilan, dan seringkali juga lemah semangatnya untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu langkah yang ditempuh dalam menyikapi keadaan tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan melalui penyuluhan pertanian. Dengan

¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Harko :

"...Karena pupuk sendiri itu diatur dengan Undang Undang. Sedangkan di masing-masing kabupaten itu kan ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang perkiraan jatah pupuk petani tiap bulannya. Tetapi karena musim tidaklah selalu sama setiap saat, jika masa tanam padi petani maju maka kami akan kalang kabut" (wawancara 1 Desember 2009).

adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian maka pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani sebagai pelaksana utama pembangunan pertanian diharapkan dapat diubah ke arah yang lebih baik yang pada jangka panjangnya akan berdampak pada peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

Pelaksanaan Undang Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pengelolaan penyuluh dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pola pengawasan dan pembinaan penyuluh terabaikan yang menyebabkan kinerja penyuluh menurun tajam. Hal tersebut mendorong Presiden RI untuk mencanangkan Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) di Jatiluhur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Juni 2005. Melalui revitalisasi penyuluhan pertanian tersebut, pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam rangka mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian diantaranya adalah penataan kelembagaan penyuluhan pertanian serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan membuat penyelenggaraan penyuluhan dapat dioptimalkan sehingga kualitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian dapat meningkat seperti yang diharapkan yang pada akhirnya peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan hidup dapat tercapai.

Sebagai tindak lanjut dari RPPK tersebut, maka pemerintah membuat suatu landasan hukum bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia yang termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Undang-Undang tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan

pelaksanaan di kalangan masyarakat. Di samping itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional. Undang-Undang ini mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang tertuang dalam 13 bab dan 41 pasal. Bab I mengatur tentang ketentuan umum; bab II tentang asas, tujuan, dan fungsi; bab III tentang sasaran penyuluhan; bab IV tentang kebijakan dan strategi; bab V tentang kelembagaan; bab VI tentang tenaga penyuluh; bab VII tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terdiri atas program penyuluhan, mekanisme kerja dan metode, materi penyuluhan, dan peran serta dan kerjasama; bab VIII tentang sarana dan prasarana; bab IX tentang pembiayaan; bab X tentang pembinaan dan pengawasan; bab XI tentang ketentuan sanksi; bab XII tentang ketentuan peralihan; dan bab XIII tentang ketentuan penutup.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini :

Tabel 15. Perbandingan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Purworejo Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

No.	Dimensi	Sebelum Otonomi Daerah	Setelah Otonomi Daerah
1.	Aspirasi dan kebutuhan petani	Kurang mendapat perhatian dari pemerintah	Lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah
2.	Kedudukan penyuluhan pertanian	Sangat penting	Tidak begitu penting
3.	Fasilitas penyuluhan pertanian	Lebih mencukupi	Kurang mencukupi
4.	Anggaran penyuluhan pertanian	Cukup besar	Cenderung kecil

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dampak positif dari adanya pelaksanaan otonomi daerah bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purworejo yaitu terwujudnya penyuluhan pertanian yang partisipatif di mana kebutuhan dan aspirasi petani mendapatkan apresiasi yang lebih baik dari pemerintah apabila dibandingkan dengan masa sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Hal tersebut tercermin dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana berdasarkan pengajuan proposal oleh kelompok tani serta penentuan lokasi pelaksana program pemerintah yang juga berdasarkan pengajuan proposal. Selain itu, penentuan materi *training* penyuluhan pertanian juga berdasarkan usulan dari tiap-tiap penyuluh pertanian dengan mempertimbangkan keadaan atau permasalahan yang tengah terjadi di wilayah binaannya.

Namun, selain membawa dampak positif pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan juga memunculkan beberapa kendala diantaranya adalah persepsi pemerintah daerah yang menganggap bahwa kedudukan penyuluhan pertanian tidaklah penting karena tidak dapat memberikan hasil dalam waktu singkat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penyuluhan pertanian mengarah kepada pemberdayaan petani dan pencapaian perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik. Hal tersebut tentunya memakan waktu yang tidak singkat mengingat mengubah perilaku petani bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi penyuluhan pertanian sendiri merupakan suatu investasi pendidikan nonformal kepada petani untuk mewujudkan perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik guna meraih peningkatan produksi dan pendapatan mereka.

Fasilitas penyuluhan juga berkurang setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah. Kendaraan dinas yang merupakan sarana penting bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya untuk saat ini masih kurang. Kendaraan tersebut berasal dari pemerintah pusat pada masa sebelum otonomi daerah yang masih digunakan hingga sekarang dan setelah pelaksanaan otonomi daerah kendaraan tersebut belum ada

penambahan lagi. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing penyuluh pertanian mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah yang berupa jaket, senter, dan sepatu untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyuluh pertanian. Tetapi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengadaan fasilitas tersebut berasal dari swadaya masing-masing penyuluh pertanian.

Dampak lain dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yaitu alokasi anggaran untuk penyuluhan pertanian oleh pemerintah daerah yang cenderung kecil karena disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing daerah. Selain itu, sebelum otonomi daerah tiap-tiap penyuluh pertanian mendapatkan biaya penyuluh dalam bentuk Uang Kerja Biaya (UKB) penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dapat digunakan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada petani dan juga untuk pelaksanaan metode penyuluhan seperti pengadaan folder, brosur, dan lain sebagainya tetapi pada masa setelah pelaksanaan otonomi daerah biaya tersebut tidak diadakan lagi. Biaya intensif yang saat ini diberikan pemerintah kepada penyuluh pertanian adalah Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang hanya sebatas uang perjalanan yang diberikan kepada penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kerjanya masing-masing.

Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya lahan pertanian yang luas dan didukung dengan besarnya jumlah tenaga kerja dalam bidang pertanian. Kawasan Ngombol bagian tengah dan utara merupakan kawasan yang berpotensi sebagai penghasil padi karena memiliki sawah yang paling luas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo, sedangkan kawasan selatan yang berupa lahan kering berpotensi sebagai penghasil komoditas palawija dan hortikultura. Melihat potensi tersebut, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah guna menciptakan perubahan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani menuju ke arah yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol, para penyuluh memberikan berbagai materi yang berguna bagi peningkatan produksi dan pendapatan petani yang disampaikan melalui berbagai metode penyuluhan yang akan mempermudah petani dalam menerima materi tersebut. Para penyuluh tersebut juga memberikan pendampingan kepada para petani dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada para petani. Adapun dampak yang terjadi dengan adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a. Perubahan Perilaku

Salah satu dampak yang terbentuk dari hasil penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu adanya perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku tersebut meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan pengetahuan yaitu perubahan yang terjadi dalam diri petani dari yang semula tidak tahu berubah menjadi tahu. Adapun perubahan pengetahuan yang dialami oleh sasaran penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Perubahan Pengetahuan yang Terjadi pada Sasaran Penyuluhan di Kecamatan Ngombol

Dimensi	Sebelum Penyuluhan Pertanian	Sesudah penyuluhan pertanian
1. Penggunaan jarak tanam	Petani tidak mengetahui jarak tanam yang tepat pada tanaman budidaya	Petani menjadi tahu jarak tanam yang tepat pada tanaman budidaya
2. Dosis Penggunaan pupuk	Petani tidak mengetahui dosis yang tepat dalam penggunaan pupuk	Petani menjadi tahu dosis yang tepat dalam penggunaan pupuk
3. Cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Petani tidak mengetahui cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Petani menjadi tahu cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik
4. Teknik budidaya padi dengan PTT dan SRI	Petani tidak tahu tentang teknik budidaya padi dengan PTT dan SRI	Petani menjadi tahu teknik budidaya padi dengan PTT dan SRI
5. Teknik budidaya tanaman hortikultura	Petani tidak mengetahui bagaimana teknik budidaya tanaman hortikultura yang benar	Petani menjadi tahu bagaimana teknik budidaya tanaman hortikultura yang benar

Perubahan sikap yaitu perubahan yang terjadi dalam diri petani dari yang semula tidak mau menjadi mau melaksanakan suatu teknologi. Perubahan sikap yang dialami sasaran penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 17. Perubahan Sikap yang Terjadi pada Sasaran Penyuluhan di Kecamatan Ngombol

Dimensi	Sebelum Penyuluhan Pertanian	Sesudah penyuluhan pertanian
1. Penggunaan jarak tanam	Petani menggunakan jarak tanam dengan cara konvensional	Petani mau menggunakan jarak tanam yang benar pada tanaman budidaya
2. Dosis penggunaan pupuk	Petani tidak menggunakan pupuk sesuai dosis yang benar	Petani mau menggunakan pupuk sesuai dosis yang benar
3. Teknik budidaya padi dengan PTT dan SRI	Petani menanam padi secara konvensional	Petani mau mencoba teknik budidaya padi dengan sistem PTT dan SRI
4. Cara pembuatan dan penggunaan pupuk organik	Petani enggan menggunakan pupuk organik pada lahan budidaya	Petani mau menggunakan pupuk organik pada lahan budidaya
5. Teknik budidaya tanaman hortikultura	Petani di sepanjang pantai selatan hanya menanami lahan mereka dengan tanaman tebu dan ketela	Petani mau menanam komoditas hortikultura seperti cabe, semangka, jagung, terong, dan lain-lain

Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa perlahan-lahan petani mau melaksanakan rekomendasi penyuluh pertanian untuk mengubah cara bercocok tanam ke arah yang lebih baik misalnya dalam hal penggunaan jarak tanam dan dosis penggunaan pupuk. Petani juga sudah bersedia untuk mencoba melaksanakan cara tanam padi dengan pola jajar legowo berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan dalam SLPTT. Untuk saat ini, para petani juga sudah banyak yang beralih menggunakan pupuk organik dalam budidaya tanaman baik itu padi maupun tanaman hortikultura, bahkan pupuk yang mereka gunakan ada yang hasil buatan sendiri. Selain itu, di daerah sepanjang pantai selatan yang semula hanya digunakan untuk budidaya tanaman ketela

dan tebu kini banyak bermunculan komoditas agribisnis baru¹¹. Adanya perubahan pengetahuan dan sikap membawa perubahan keterampilan pada petani terlihat yaitu timbulnya keterampilan bercocok tanam padi dengan sistem SRI dan PTT, keterampilan dalam bercocok tanam cabe, jagung, semangka, dan komoditas agribisnis lainnya.

b. Peningkatan Produksi dan Pendapatan

Pengaruh penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol terhadap produksi usahatani yaitu adanya peningkatan produksi usahatani pada para petani¹²dan¹³. Dengan adanya peningkatan produksi dalam usahatani para petani tersebut, maka juga akan terjadi peningkatan pendapatan. Perubahan komoditas di sepanjang pantai selatan dari yang semula hanya berupa ketela dan tebu yang kini telah beralih ke komoditas agribisnis seperti semangka, jagung, terong, cabai, dan lain sebagainya juga berdampak pada peningkatan pendapatan para petani di daerah tersebut. Namun demikian, ada informan yang mengemukakan bahwa hasil produksinya masih belum mengalami peningkatan. Menurut penjelasan Bapak Sukari, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2008 kemarin pemerintah khususnya Departemen Pertanian memberikan lampu kuning dalam peredaran pupuk dalam artian pemberian pupuk kimia agak dikurangi. Faktor itulah yang menyebabkan penurunan produksi.

¹¹ Hal itu termuat dalam pernyataan Bapak Sujito :

“Sebelum petani diikuti oleh tim penyuluhan, petani di sini kan maunya menanam ketela kaspo dan tebu. Dulu petani kalau diajak untuk menanam kacang atau kedelai itu tidak mau karena belum pernah ada yang coba-coba. Tapi ternyata setelah adanya para penyuluh yang sifatnya mendukung sekali bahkan ada yang agak memaksakan kehendak dari tim penyuluh akhirnya ada satu dua yang mencobanya. Nah, setelah dicoba kok hasilnya daripada ketela kaspo maupun tebu kok lebih bagus ditanami seperti sekarang ini, seperti jagung, terong, cabe, dan sebagainya. Jadi secara otomatis dengan sendirinya masyarakat langsung merombak tanaman ketela dan tebunya. Ya ada yang masih tetap menanamnya, tetapi cuma sedikit sekali” (wawancara 18 November 2009).

¹² Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Slamet :

“Sebelum menerapkan sistem SRI, tiap 1 ha hanya menghasilkan 5-6 ton padi, tetapi setelah menerapkan sistem SRI maka 1 ha bisa menghasilkan rata-rata 7,5 ton padi bahkan ada yang pernah mencapai 11,8 ton” (wawancara 14 September 2009).

¹³ Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Maryono :

“Tanaman palawija, sebelum adanya penyuluhan pertanian kami hanya asal menanam, tidak dipupuk dan disemprot. Sekarang setelah adanya penyuluhan pertanian, petani mau berubah dan ternyata produksinya lebih bagus daripada sebelumnya terutama untuk tanaman jagung” (wawancara 19 Oktober 2009).

c. Kelompok, Organisasi, dan Kelembagaan

Kelompok, organisasi dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu lumbung desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol membawa suatu dampak dalam perbaikan suatu kelembagaan yang terlibat dalam penyuluhan pertanian. Dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirasakan oleh lumbung desa yaitu pengurus lumbung desa menjadi tahu bagaimana cara membuat administrasi lumbung desa yang baik¹⁴. Sedangkan dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirasakan oleh ibu-ibu PKK yaitu adanya perubahan keterampilan dalam hal ketahanan pangan, keanekaragaman gizi, dan pemanfaatan pekarangan terutama untuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

B. Temuan Pokok

Beberapa temuan pokok yang ditemukan dalam hasil penelitian Studi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngombol adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang ada di Kecamatan Ngombol meliputi program peningkatan kesejahteraan petani; program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan perkebunan; program peningkatan produksi pertanian, perikanan, perkebunan yang didukung dengan adanya program-program pemerintah seperti BLBU, SLPTT, dan JIDES/ JITUT.
2. Kelembagaan penyuluhan yang ada di Kecamatan Ngombol untuk saat ini adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), kelembagaan pelaku utamanya berupa kelompok tani, gapoktan, dan wanita tani.

¹⁴ Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Markuat selaku ketua Lumbung Desa Sri Makmur Desa Tunjungan :
“Pengurus Lumbung Desa menjadi tahu bagaimana cara membuat administrasi Lumbung Desa yang lebih baik. Dulu Lumbung Desa dikelola secara tradisional tetapi sejak adanya bimbingan dari para petugas penyuluh dari kecamatan, kita diberitahu bagaimana cara menertibkan administrasi, anggotanya bagaimana, masalah pengeluaran, dan juga penarikan bunga” (wawancara 3 Desember 2009).

3. Selain penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta, di dalam ketenagaan penyuluhan di Kecamatan Ngombol juga terdapat penyuluh swadaya.
4. Sarana dan prasarana penyuluhan di BPK Ngombol dirasakan masih kurang mencukupi.
5. Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu ceramah, diskusi, demplot, sekolah lapang, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, perlombaan, dan demonstrasi cara, demonstrasi hasil, anjungsana dan anjangkarya.
6. Jenis materi yang disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu disesuaikan dengan musim, teknik budidaya komoditas agribisnis, hama dan penyakit tanaman, materi tentang program pemerintah seperti SLPTT, pengembangan pupuk organik, pembudidayaan tanaman padi dengan *System of Rice Intensification* (SRI), dan pembuatan pupuk bokasi.
7. Kerjasama yang terjalin dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu kerjasama dalam hal pengadaan saprodi, pembiayaan penyuluhan, pembuatan benih dan pemasaran.
8. Kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu PKK dan Lumbung Desa.

C. Pembahasan

Kebijakan pemerintah yang ada di Kecamatan Ngombol meliputi program peningkatan kesejahteraan petani; program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan perkebunan; program peningkatan produksi pertanian, perikanan, perkebunan yang didukung dengan adanya program-program pemerintah seperti BLBU, SLPTT, dan JIDES/ JITUT. BLBU diberikan kepada 25 desa di Kecamatan Ngombol. Untuk rencana sebar awal bulan Maret, 25 desa tersebut mendapatkan bantuan benih padi inhibrida varietas Ciherang sebanyak 25 ton untuk luasan 1000 Ha dan untuk

rencana sebar awal bulan September mendapat bantuan benih padi hibrida varietas Intani II sebanyak 1,5 ton untuk luasan 100 Ha. BLBU padi hibrida jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan padi in hibrida karena resiko dalam pembudidayaannya lebih besar dan baru sebatas sosialisasi kepada para petani. Kelompok tani pelaksana SLPTT di Kecamatan Ngombol masa tanam 2009 adalah 20 Kelompok tani dengan luasan masing-masing sebanyak 25 Ha dengan varietas padi IR 64. Masing-masing kelompok tani mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp 2.645.000,00. Desa-desa yang pernah menjadi sasaran program JIDES/JITUT di Kecamatan Ngombol yaitu Desa Pejagran, Kumpulsari dan Wingko Sigromulyo. Ketiga desa ini mendapatkan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk membangun saluran irigasi dengan mengandalkan partisipasi para petani. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan faktor pelancar dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Ngombol. Oleh karena itu, para penyuluh pertanian dituntut untuk dapat memahami kebijakan-kebijakan tersebut dalam merencanakan maupun melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada para petani. Demikian juga dengan pembuatan program penyuluhan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan sumber acuan dalam pembuatan program penyuluhan di Kecamatan Ngombol.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah yang ada di Kecamatan Ngombol untuk saat ini adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Kelembagaan ini berperan untuk memberikan informasi pertanian kepada petani, mengkoordinir program penyuluhan di masing-masing PPL untuk dijadikan program BPK dan untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ngombol. Akan tetapi keberadaan BPK tersebut hanya diketahui oleh penyuluh pertanian sedangkan informan lainnya terutama petani belum mengetahui tentang kelembagaan tersebut. Hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa penyuluh pertanian merupakan petugas yang juga menyatu dengan petugas kantor kecamatan dan tidak memiliki bentuk kelembagaan tersendiri. Di Kecamatan Ngombol tidak terdapat kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya. Selama ini yang ada hanyalah para

personelnya saja. Kelembagaan penyuluhan swasta seperti para produsen benih, pupuk, dan pestisida yang memberikan penyuluhan di Kecamatan Ngombol berkantor di kota lainnya seperti Yogyakarta dan Kebumen. Sedangkan untuk kelembagaan penyuluhan swadaya memang belum terbentuk dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Kelembagaan pelaku utama di Kecamatan Ngombol berupa kelompok tani, gapoktan, dan wanita tani. Peran kelompok tani yang dirasakan oleh para anggotanya adalah untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya terutama dalam bidang saprodi terutama pupuk yaitu dengan pembuatan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Selain itu, kelompok tani merupakan suatu wadah bagi petani untuk mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah seperti BLBU, SLPTT, JIDES/JITUT maupun bantuan sarana dan prasarana yaitu dengan pembuatan proposal. Gapoktan di Kecamatan Ngombol tidak begitu berkembang. Faktor utamanya yaitu kurangnya kesadaran petani akan pentingnya berorganisasi dan peran penting gapoktan dalam menunjang usahatani serta adanya kendala dalam hal permodalan. Modal yang kecil membuat gapoktan kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan para anggotanya. Wanita tani yang terbentuk dan masih aktif hingga sekarang yaitu Wanita Tani Mina Lea di Desa Keburuhan dan Wanita Tani Putri Mandiri di Desa Cokroyasan. Kedua kelompok wanita tani tersebut bergerak dalam pengolahan pasca panen ikan terutama ikan laut, oleh karena itu wanita tani di kecamatan Ngombol hanya terdapat di wilayah bagian selatan yang merupakan daerah pantai.

Selain penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta, di dalam ketenagaan penyuluhan di Kecamatan Ngombol juga terdapat penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya berperan membantu penyuluh pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada petani, sebagai motivator petani disekitarnya, sebagai tempat berdiskusi tentang masalah-masalah yang tengah dihadapi. Penyuluh swadaya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah walaupun sudah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 yang menjelaskan aturan tentang pembinaan

penyuluh swadaya. Hal tersebut karena pelaksanaan Permentan ini diserahkan kepada daerah, sedangkan Kabupaten Purworejo merupakan Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya tergolong kecil, jadi belum mampu untuk menindaklanjuti Permentan tersebut.

Sarana dan prasarana yang terdapat di BPK Ngombol yaitu 3 unit kendaraan dinas, 1 unit timbangan, 1 unit pengukur pH tanah, tabloid Sinar Tani, kalender, 2 unit almari, 1 papan kerja BPK, 9 unit meja, 13 unit kursi, dan 1 unit jam dinding. Sarana yang berasal dari pemerintah adalah kendaraan dinas, tabloid Sinar Tani, timbangan, dan alat ukur pH tanah yang sudah dalam kondisi rusak sedangkan yang lainnya merupakan hasil dari swadaya penyuluh pertanian BPK Ngombol. Sarana dan prasarana tersebut dirasakan masih kurang, terutama untuk gedung penyuluhan dan lahan percobaan yang merupakan fasilitas penting dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Gedung penyuluhan BPK Ngombol begitu sempit dan masih menjadi satu dengan kantor Kecamatan Ngombol. Lahan percobaan juga sangat penting terutama dalam pelaksanaan demplot. Selama ini, lahan yang digunakan untuk pelaksanaan demplot adalah lahan milik petani dan penyuluh pertanian. Kendaraan dinas juga hanya dikhususkan untuk penyuluh pria. Penyuluh wanita tidak ada yang mendapatkan kendaraan dinas yang merupakan fasilitas penting dalam memperlancar mobilitas penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada para petani. Untuk kedepannya, sarana dan prasarana yang diinginkan penyuluh pertanian BPK Ngombol yaitu kendaraan dinas, lahan percontohan, gedung penyuluhan sendiri dan fasilitasnya, dan alat peraga.

Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu ceramah, diskusi, demplot, sekolah lapang, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, perlombaan, dan demonstrasi cara, demonstrasi hasil, anjagsana dan anjangkarya. Metode yang dominan digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu ceramah, diskusi, dan kunjungan baik anjagsana maupun anjangkarya. Hal tersebut karena dana yang tersedia untuk

melaksanakan metode penyuluhan sangat terbatas, jadi dengan penggunaan metode tersebut materi penyuluhan dapat tersampaikan kepada para petani dengan dana yang relatif murah. Pelaksanaan sekolah lapang biasanya hanya terdapat dalam pelaksanaan program pemerintah seperti SLPTT karena metode ini adalah metode penyuluhan pertanian yang terkesan mahal. Pelaksanaan demplot biasanya bekerjasama dengan para penyuluh swasta.

Jenis materi yang disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu disesuaikan dengan musim, teknik budidaya komoditas agribisnis, hama dan penyakit tanaman, materi tentang program pemerintah seperti SLPTT, pengembangan pupuk organik, dan pembudidayaan tanaman padi dengan *System of Rice Intensification (SRI)*. Dasar pemilihan materi penyuluhan oleh penyuluh yaitu kondisi di lapangan dan kebutuhan petani. Selain disesuaikan dengan musim, materi-materi tersebut pada dasarnya adalah materi yang bertujuan untuk peningkatan produksi dan pendapatan para petani sehingga dapat menarik perhatian sasaran penyuluhan.

Lingkup kerjasama yang terjalin dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu kerjasama dalam hal pengadaan saprodi, pembiayaan penyuluhan, pembuatan benih dan pemasaran. Jaringan kerjasama dalam pembuatan benih dan pemasaran sangat bermanfaat bagi para petani. Kerjasama dalam pemasaran dilakukan oleh petani padi organik dengan agen pemasaran. Dengan adanya kerjasama tersebut, petani padi organik lebih mudah dalam memasarkan padi organiknya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar lokal. Kerjasama pembuatan benih dilakukan oleh para petani di Desa Keburuhan produsen benih kacang panjang dan dengan PT. Branita Sendiri yang merupakan produsen benih jagung. Petani mendapatkan benih dari kedua produsen benih tersebut. Selama pemeliharaan tanaman, petani mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pihak produsen benih. Setelah panen, hasilnya dijual ke produsen benih dengan harga yang disepakati, yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan di pasar lokal.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol juga telah menyebabkan adanya perbaikan dalam kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang terlibat dalam penyuluhan pertanian. Kelompok, organisasi dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu PKK dan Lumbung Desa. Dampak yang dirasakan oleh Lumbung Desa yaitu adanya perbaikan dalam administrasi lumbung desa Pengurus Lumbung Desa menjadi tahu bagaimana cara membuat administrasi Lumbung Desa yang lebih baik. Dulu Lumbung Desa dikelola secara tradisional tetapi sejak adanya bimbingan dari para petugas penyuluh pertanian mereka mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menertibkan administrasi baik yang berhubungan dengan anggota, pengeluaran, maupun penarikan bunga. Dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirasakan oleh ibu-ibu PKK yaitu adanya perubahan keterampilan dalam hal pencapaian ketahanan pangan, keanekaragaman gizi, dan pemanfaatan pekarangan terutama untuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis hasil dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen penyuluhan pertanian yang berperan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yaitu kebijakan pemerintah, sasaran penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan serta pembiayaan penyuluhan pertanian.
2. Kebijakan pemerintah berperan sebagai bahan acuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sasaran penyuluhan sebagai obyek penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan berperan memberikan informasi pertanian kepada petani, mengkoordinir program penyuluhan di masing-masing PPL dan untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penyuluhan di Kecamatan Ngombol. Kelembagaan pelaku utama berperan untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya terutama dalam bidang saprodi, sebagai wadah koordinasi para anggotanya, untuk penyusunan RDKK guna memenuhi kebutuhan kelompok, dan untuk mengajukan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ketenagaan penyuluhan berperan sebagai motivator dan penyampai informasi atau program pemerintah kepada petani yang terkait dengan pertanian, kemajuan petani dan peningkatan produksi. Sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan berperan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian sehingga kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan efektif.
3. Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol tercakup dalam empat aspek yaitu program penyuluhan, mekanisme kerja dan metode, materi penyuluhan serta peran serta dan kerjasama. Program penyuluhan berisi tentang kondisi wilayah, kebijakan pemerintah, tujuan dan sasaran penyuluhan, serta rencana penyuluhan pertanian selama satu tahun ke depan. Mekanisme kerja yang berjalan yaitu mekanisme

sentralistik dan partisipatif sedangkan metode penyuluhan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, demplot, sekolah lapang, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, perlombaan, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, anjagsana, dan anjangkarya. Materi yang disampaikan yaitu disesuaikan dengan musim, teknik budidaya komoditas agribisnis, hama dan penyakit tanaman, materi tentang program pemerintah, pengembangan pupuk organik, dan pembudidayaan tanaman padi dengan *System of Rice Intensification (SRI)*. Pihak-pihak yang berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu kepala desa beserta perangkatnya, camat, ketua kelompok tani, pengurus dan anggota kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pedagang saprodi. Kerjasama yang terjalin yaitu berkaitan dengan hal pengadaan saprodi, pembiayaan penyuluhan, pembuatan benih dan pemasaran.

4. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu keterbatasan dana dan sarana prasarana dalam penerapan metode penyuluhan, kesulitan dalam mempraktekkan materi penyuluhan, keterlambatan penyaluran pupuk, dan konflik yang terjadi antara petani dengan agen pemasaran.
5. Dampak yang terjadi dengan adanya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol yaitu adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan para petani, peningkatan produksi dan pendapatan usahatani, serta adanya perbaikan organisasi Lumbung Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

E. Saran

1. Penyuluh pertanian di BPK Ngombol sebaiknya lebih meningkatkan perannya terutama peran sebagai pembimbing, organisator, dan dinamisator petani kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan tambahan sarana dan prasarana kepada kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang berupa kendaraan

dinas, lahan percontohan, gedung penyuluhan sendiri dan fasilitasnya, serta alat peraga penyuluhan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngombol.

3. Kerjasama antara penyuluh pemerintah, penyuluh swasta, penyuluh swadaya dan kelompok tani terkait pembiayaan penyuluhan pertanian diharapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi.
4. Pemerintah daerah sebaiknya selalu memberikan pembinaan dan pemantauan dalam peredaran pupuk agar permasalahan dalam penyaluran pupuk kepada petani dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2008. *Strategi Baru Pembangunan Pertanian*. <http://tkpkri.org/berita/berita/strategi-baru-pembangunan-pertanian.html>. Diakses pada tanggal 23 September 2008.
- Afandi, A.K. 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. 2009. *Modul Pembekaan Bagi THL TB Penyuluh Pertanian*. Departemen Pertanian. Jawa Tengah.
- Brainy Media. 2009. *Definition of Mechanism*. <http://www.brainyquote.com/words/me/mechanism188680.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2009.
- Departemen Pertanian. 2004. *Ringkasan Eksekutif Pengkajian 2004*. http://www.deptan.go.id/bpsdm/puskaji/hasil-kajian/ringk_kajian2004.htm. Diakses pada tanggal 20 Desember 2008.
- Hadisapoetra, Soedarsono. 1973. *Pembangunan Pertanian*. Departemen Ekonoi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Hawkins et all. 1982. *Agricultural and Livestock Extension Volume 2*. Australian University International Development Program. Canberra.
- Kartasapoetra, AG. 1991. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Radar Jaya Offset. Jakarta.
- Kelsey, LD and Cannon CH. 1955. *Cooperative Extension Work*. Comstock Publishing Associates. New York.
- Kompas Cybermedia. 2007. *Penyuluhan Pertanian Belum Efektif*. <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0711/24/154906.htm>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2009.
- Mantra, IB. 2008. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardikanto, Totok. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- , 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto, T dan Arip Wijianto. 2005. *Modul Kuliah Metoda dan Teknik Penyuluhan Pertanian*. Proyek SP4 UNS. Surakarta.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Lampiran 1 Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.*

-----.. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Lampiran 2 Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).* Departemen Pertanian. Jakarta.

-----.. 2007. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani Lampiran 3 Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan.* Departemen Pertanian. Jakarta.

Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung.

-----.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mukherjee. 1969. *Asian Development Bank.* University of Tokyo Press. Tokyo.

National Portal Content Management Team. 2008. *Agricultural Extension Programmes.* <http://india.gov.in/default.php>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2009.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 2005. *Penelitian Terapan.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Pearson, Scott et all. 2004. *Application of The Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture.* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Rivera, WM. 2001. *Agricultural and Rural Extension Worldwide: Options for Institutional Reform in the Developing Countries.* <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y2709e/y2709e.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2009.

Sastraatmadja, Entang. 1993. *Penyuluhan Pertanian.* Alumni. Bandung.

Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Ghalia Indonesia. Bogor.

- Subejo. 2007. *Demokratisasi Pembangunan Pertanian di Era Otonomi Daerah : Tinjauan dari aspek Penyuluhan Pertanian*. <http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/cultivar-juni-2007.pdf>. Diakses pada tanggal 25 September 2008.
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga. Jakarta.
- Supanggyo. 2007. *Buku Penunjang Kuliah Administrasi Penyuluhan Pertanian*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutopo, H B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Tanjung, HB. 2008. *Drama Super Toy : Bukti Pentingnya Penyuluhan*. www.padangekspres.co.id. Diakses pada tanggal 5 Mei 2009.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

